

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



KECAMATAN MUARA JAWA



RANCANGAN AKHIR



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)



TAHUN 2025 - 2029



ALAMAT : JLN. IR. SOEKARNO NO. 58 KEL. MUARA JAWA ULU

WEBSITE : WWW.MUARAJAWA.ID

E-MAIL : KECMUARAJAWA2020@GMAIL.COM

KATA PENGANTAR

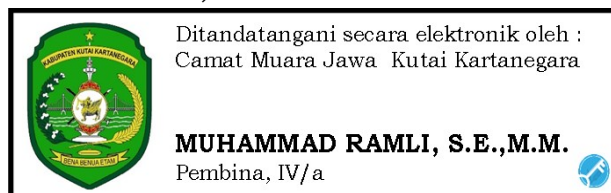
Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan karuniaNya-lah akhirnya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa ini merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Muara Jawa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang secara garis besar membahas tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Muara Jawa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, dibahas juga tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang berhubungan langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap bahwa Renstra yang kami susun ini dapat mengakomodir seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian target kinerja selama 5 tahun.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan Pembangunan.

Muara Jawa, 5 Januari 2026





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno Nomor 58 Kelurahan Muara Jawa Ulu
Website : www.muarajawa.id e-mail : kecmuarajawa2020@gmail.com Kodepos 75261

SURAT KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : P-1/M.JAWA/000.7.2/12/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 - 2029

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, di atas maka guna tertib hukum dan administrasi dalam pelaksanaannya di pandang perlu diatur dan ditetapkan dengan menetapkan Keputusan Camat Muara Jawa tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD, dan RKPD.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Nomor 29)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73)
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 69);
18. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 247/SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-355/BAPPEDA/000.7.2/11/2024 Tanggal 26 November 2024 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Studi Pendahuluan Renstra OPD 2025 – 2029.

2. Peran dan fungsi tugas dari Tim Penyusunan Rencana Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025 - 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Camat Muara Jawa tentang Pembentukan Tim Penyusunan (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

KESATU : Tim Penyusunan (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Kecamatan Muara Jawa;

3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Kecamatan Muara Jawa tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Jawa;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Jawa;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan Muara Jawa dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan PD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 - 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Muara Jawa ini;

KETIGA : Menunjuk Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **Muara Jawa**
Pada Tanggal : **31 Desember 2024**
Camat Muara Jawa,

MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.

Pembina, IV/a

NIP. 19750604 200012 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
3. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kab. Kutai Kartanegara di – Tenggarong
4. Danramil 0906-05/Muara Jawa di – Muara Jawa
5. Kapolsek Muara Jawa di – Muara Jawa
6. Arsip,

Lampiran : Surat Keputusan Camat Muara Jawa.
Nomor : P-1/M.JAWA/000.7.2/12/2024
Tanggal : 31 Desember 2024

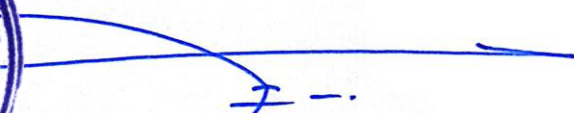
**NAMA - NAMA TIM PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MUARA JAWA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025 - 2029**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Muhammad Ramli, S.E.,M.M.	Camat Muara Jawa	Penanggung Jawab
2	Edy Kasianto S, S.Pd	Sekretaris Camat	Ketua Merangkap Anggota
3	Nila Irmawati, S.Mn	Kasubbag Program dan Keuangan	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Syamsul Bahri, S.E.	Kasi Pemerintahan	Anggota
5	Ruli Hambrani, S.Ag.,M.M.	Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota
6	Hj. Norjanah, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum	Anggota
7	Rohana, S.Sos	Kasi Sosial	Anggota
8	Akmidatul Muslimah, A.Md	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
9	Dina Mariana, S.E.,M.M.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
10	H. Rudiansyah, S.E.	Lurah Muara Jawa Ilir	Anggota
11	Masriansyah, S.Sos	Lurah Muara Jawa Tengah	Anggota
12	Adi Kresna, S.P.	Lurah Muara Jawa Pesisir	Anggota
13	Usman, S.Pdi	Lurah Muara Jawa Ulu	Anggota
14	H. Nordiansyah, S.Sos, M.Adm.KP	Lurah Dondang	Anggota
15	Syamsu Rizal, S.Pd.,M.M	Lurah Teluk Dalam	Anggota
16	Fatmawati, S.Sos.,M.Si	Lurah Tamapole	Anggota
17	Mukosim, S.IP	Lurah Muara Kembang	Anggota
18	Ifni Hanifah Gani	Pelaksana	Anggota

19	Noor Hasanah	Pelaksana	Anggota
20	Nurhamidah	Pelaksana	Anggota
21	Mawarni	Pelaksana	Anggota



Ditetapkan di : Muara Jawa
Pada Tanggal : 31 Desember 2024
Camat Muara Jawa,


MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina, IV/a
NIP. 19750604 200012 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.1.4 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.....	80
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	85
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	85
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	89
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	107
3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	107
3.1.1 Tujuan Renstra Kecamatan Muara Jawa.....	107
3.1.2 Sasaran Renstra Kecamatan Muara Jawa	108
3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025-2029	116
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Sasaran Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025-2029.	119
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	122
4.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	122
4.2 SubKegiatan Prioritas	173
4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	173
BAB V PENUTUP	178

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Sebaran Luas Wilayah dan Jumlah RT Per Kelurahan.....	7
Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga.....	7
Tabel 2. 3. Data Pegawai Menurut Golongan.....	19
Tabel 2. 4. Data Pegawai Berdasarkan Jenis dan Kelas Jabatan.....	19
Tabel 2. 5. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	20
Tabel 2. 6. Data PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang.....	21
Tabel 2. 7. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural.....	21
Tabel 2. 8. Data Barang Milik Daerah Kecamatan Muara Jawa.....	22
Tabel 2. 9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Jawa	32
Tabel 2. 10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa	49
Tabel 2. 11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa	85
Tabel 2. 12. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	97
Tabel 3. 1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	109
Tabel 3. 2. Strategi Renstra Kecamatan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025-2029	116
Tabel 3. 3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah	118
Tabel 3. 4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	120
Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	124
Tabel 4. 2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Muara Jawa.....	145
Tabel 4. 3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	173
Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Jawa	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Muara Jawa.....	6
Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Muara Jawa.....	9
Gambar 3. Program Dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	90
Gambar 4. Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	107
Gambar 5. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	108
Gambar 6. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Muara Jawa merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan luas wilayah yang mencakup berbagai potensi sumber daya alam, seperti perkebunan, pertanian, dan kehutanan, serta keanekaragaman hayati yang tinggi, Kecamatan Muara Jawa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan. Posisi geografisnya yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memberikan peluang dan tantangan baru yang memerlukan perencanaan strategis untuk menghadapi dinamika pembangunan pada periode 2025-2029.

Pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk Kecamatan Muara Jawa akan memasuki periode baru yaitu tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut perlu disusun dokumen perencanaan jangka menengah. Pasal 272 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025, menandai dimulainya Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, Kegiatan, dan Sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Tahapan penyusunan Renstra PD meliputi: Persiapan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Muara Jawa menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa ini didasarkan pada berbagai peraturan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136);
5. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil; dan
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan Kecamatan Muara Jawa dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik good governance dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan Kecamatan Muara Jawa
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Muara Jawa
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Muara Jawa untuk periode 5 (lima) tahun kedepan
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran
5. Menyediakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja target, dan pagu indikatif
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
7. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Muara Jawa.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- Menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Kecamatan Muara Jawa.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- Membahas tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini serta mengemukakan alasan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Muara Jawa ini untuk memaksimalkan pelayanan dan mendukung pembangunan yang merata serta berkelanjutan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- Strategi dan arah kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
- Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
- Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 dan program prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.
- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

BAB V PENUTUP

- Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Secara Geografis, Kecamatan Muara Jawa berada pada posisi: 117' – 118' Bujur Timur, 50' Lintang Selatan. Wilayah Kecamatan Muara Jawa adalah daerah pesisir pantai yang kaya dengan hasil bumi terutama minyak bumi, gas alam, dan batu bara serta sumber daya pertanian, Perkebunan, dan perikanan. Berada di sebelah Tenggara ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, terletak di muara Sungai Mahakam dan disebut sebagai Delta Mahakam.

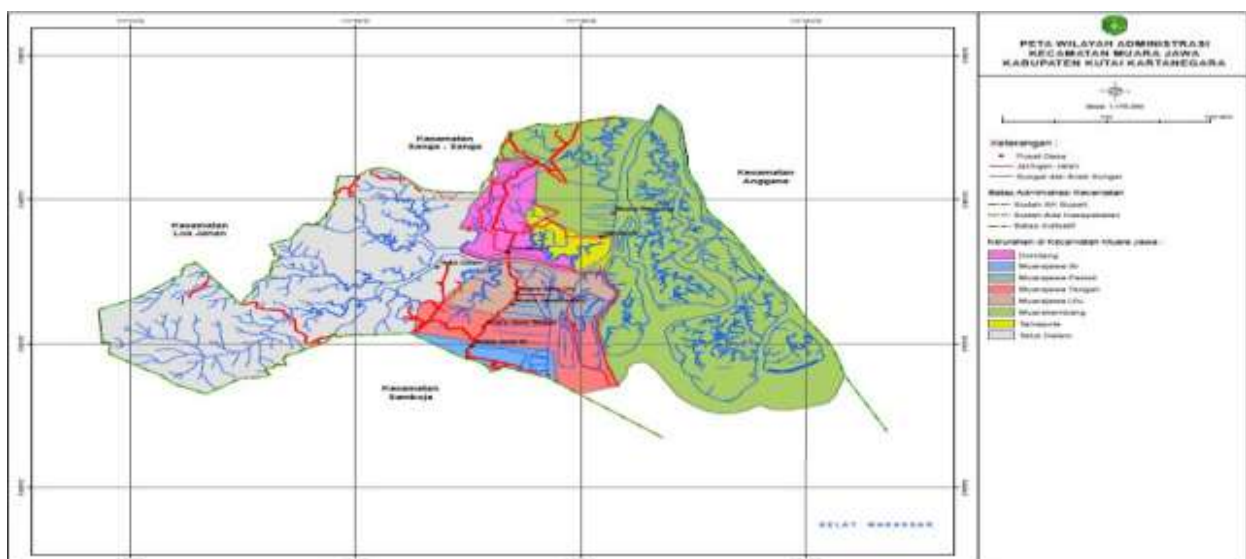
Wilayah Kecamatan Muara Jawa berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sangasanga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Samboja;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Anggana dan Selat Makassar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan.

Kecamatan Muara Jawa terdiri dari 8 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Muara Jawa Ilir
2. Kelurahan Muara Jawa Tengah;
3. Kelurahan Muara Jawa Ulu;
4. Kelurahan Muara Jawa Pesisir;
5. Kelurahan Teluk Dalam;
6. Kelurahan Dondang;
7. Kelurahan Tama Pole;
8. Kelurahan Muara Kembang.

Peta wilayah Kecamatan Muara Jawa dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Muara Jawa

Luas wilayah Kecamatan Muara Jawa sekitar 619,16 KM². Sebaran luas wilayah serta jumlah Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Muara Jawa adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Sebaran Luas Wilayah dan Jumlah RT Per Kelurahan

Kelurahan	Luas Wilayah (KM ²)	RT
Muara Jawa Ilir	13,41656151	22
Muara Jawa Tengah	39,78960500	20
Muara Jawa Ulu	27,36396300	41
Muara Jawa Pesisir	215,93615300	7
Teluk Dalam	12,60443200	32
Dondang	30,51568000	14
Tama Pole	15,17716600	3
Muara Kembang	261,00996500	15
JUMLAH	615,81352551	154

Sumber: Data Seksi Pemerintahan Kecamatan Muara Jawa, Juni 2025.

Untuk aspek penduduk di Kecamatan Muara Jawa cukup majemuk karena terdiri dari berbagai suku dan agama. Sebagian besar penduduk Kecamatan Muara Jawa adalah suku pendatang. Jumlah penduduk Kecamatan Muara Jawa per 30 Juni 2025 mencapai 39.175 jiwa dan Jumlah KK 12.914. Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Muara Jawa di 8 kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

NO	KELURAHAN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	JML
1	Muara Jawa Ilir	1.167	2.001	1.815	3.816
2	Muara Jawa Tengah	2.019	2.782	2.559	5.341
3	Muara Jawa Ulu	4.174	5.841	5.922	11.763
4	Teluk Dalam	308	474	441	915
5	Dondang	999	1.604	1.401	3.005
6	Tama Pole	141	270	231	501
7	Muara Kembang	949	1.808	1.709	3.517
8	Muara Jawa Pesisir	3.157	5.360	4.957	10.317
Jumlah		12.914	20.140	19.035	39.175

Sumber: Data Seksi Pemerintahan Kecamatan Muara Jawa, 30 Juni 2025

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, maka tugas pokoknya adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

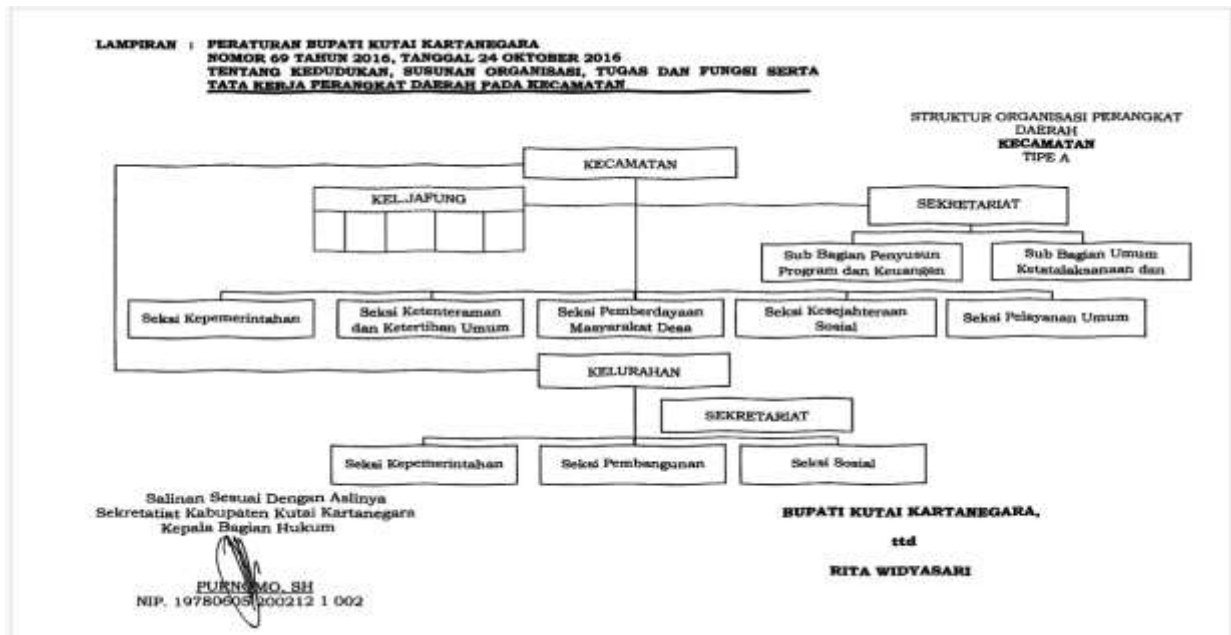
Fungsi Kecamatan adalah:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat (Sekcam), terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum.

Struktur organisasi Kecamatan Muara Jawa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan:



Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Muara Jawa

Uraian Tugas Camat meliputi:

- memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan;
- merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau kelurahan;
- mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan

- pemerintahan Kelurahan atau kelurahan dan penanggulangan bencana;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan;
 - h. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;
 - i. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;
 - j. mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan masyarakat Kelurahan, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Sekretaris meliputi:

- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan

- pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
 - h. mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa;
 - k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat; dan
 - l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak

- berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD
- e. merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
 - f. merencanakan pelaksanaan SIMPEG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
 - g. merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - h. merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - i. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
 - k. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

- b. menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris;
- d. merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;
- e. menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
- f. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran , verifikasi pengelolaan keuangan
- g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
- j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan;
- d. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Kelurahan dan atau kelurahan;
- e. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- f. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan Kelurahan dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;

- g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi Kelurahan dan atau kelurahan;
- h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan Kelurahan dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Kelurahan, pembentukan Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga;
- i. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran Kelurahan/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar Kelurahan dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan;
- j. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas Kelurahan dan kekayaan Kelurahan;
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;
- l. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan; dan
- n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketenteraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Kelurahan/kelurahan;

- d. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- e. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA;
- g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama;
- h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- i. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- j. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- k. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
dan
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan,

- perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- d. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita;
 - e. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
 - f. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih PerKelurahan;merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang;
 - g. merencanakan kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air;
 - h. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
 - i. merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
 - j. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - k. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; dan
 - m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;

- d. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- e. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;
- g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial;
- h. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
- i. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan;
- j. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama;
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial;
- l. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial;
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial; dan
- n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum meliputi:

- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
- b. menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan;
- d. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;
- e. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- f. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
- g. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan Kelurahan/kelurahan serta pelaporan data tanah kas Kelurahan dan kekayaan Kelurahan;
- h. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;
- i. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
- j. merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum;
- l. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum; dan
- n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Muara Jawa memerlukan ketersediaan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya penunjang/pendukung lainnya yang diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi sumber daya yang dimiliki Kecamatan Muara Jawa sebagai berikut:

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Muara Jawa untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Aparatur Sipil Negara baik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Tenaga Harian Lepas yang total berjumlah 153 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Data Pegawai Menurut Golongan

No	GOLONGAN	PEGAWAI		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	I	0	0	0
2	II	6	11	17
3	III	20	28	48
4	IV	7	2	9
5	NON ASN	28	51	79
JUMLAH		61	92	153

Sumber: Data Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kecamatan Muara Jawa, Juni 2025.

Tabel 2. 4. Data Pegawai Berdasarkan Jenis dan Kelas Jabatan

NO.	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH ORANG
1	2	3	4
1. PNS			
	Jabatan Administrator	12	1
	Jabatan Administrator	11	1
	Jabatan Pengawas	9	12
	Jabatan Pengawas	8	33
	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	3
	Pengadministrasi Perkantoran	5	4
	Pengelola Layanan Operasional	6	1
	Pengolah Data dan Informasi	6	16

NO.	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH ORANG
	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3
	JUMLAH PNS		74
2. PPPK			
	Penata layanan Operasional	7	25
	Pengadministrasi Perkantoran	5	37
	Pengelola Umum Operasional	1	1
	Penata layanan Operasional (TAHAP II)	7	3
	Penata layanan Operasional (PARUH WAKTU)	7	1
	Pengadministrasi Perkantoran (TAHAP II)	5	2
3. THL			
	Petugas kebersihan (Kecamatan)		2
	Petugas kebersihan (Kelurahan)		4
	Penjaga Malam (Kecamatan)		2
	Penjaga Malam (Kelurahan)		2
	JUMLAH PPPK DAN THL		79
	JUMLAH PEGAWAI		153

Sumber: Data Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kecamatan Muara Jawa, Juni 2025

Tabel 2. 5. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	PEGAWAI		JUMLAH
		ASN	NON ASN	
1	S.3	0	0	0
2	S.2	9	0	9
3	S.1	46	29	75
4	D-IV	0	0	0
5	SM	0	0	0
6	D-III	1	0	1
7	D-II	0	0	0
8	D-I	0	0	0
9	SLTA	17	45	62

NO.	PENDIDIKAN	PEGAWAI		JUMLAH
		ASN	NON ASN	
10	SLTP	1	1	2
11	SD	0	4	4
JUMLAH		74	79	153

Sumber Data : Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kecamatan Muara Jawa, Juni 2025

Tabel 2. 6. Data PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO.	PANGKAT	GOL. RUANG	PEGAWAI		JUMLAH
			PRIA	WANITA	
1	Juru Muda	I/a	0	0	0
	Juru Muda TK I	I/b	0	0	0
	Juru	I/c	0	0	0
	Juru TK I	I/d	0	0	0
II	Pengatur Muda	II/a	0	0	0
	Pengatur Muda TK. I	II/b	1	0	1
	Pengatur	II/c	1	3	4
	Pengatur TK. I	II/d	5	8	13
III	Penata Muda	III/a	8	0	8
	Penata Muda TK. I	III/b	5	9	14
	Penata	III/c	3	3	6
	Penata TK.I	III/d	11	8	19
IV	Pembina	IV/a	7	2	9
	Pembina TK. I	IV/b	0	0	0
	Pembina Utama Muda	IV/c	0	0	0
	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0
	Pembina Utama	IV/e	0	0	0
JUMLAH			41	33	74

Sumber: Data Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kecamatan Muara Jawa, Juni 2025.

Tabel 2. 7. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

NO.	ESSELON	PEGAWAI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	I	0	0	0
2	II	0	0	0
3	III/a	1	0	1
4	III/b	1	0	1

NO.	ESSELON	PEGAWAI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
5	IV/a	9	4	13
6	IV/b	15	18	33
7	V			
	JUMLAH ESSELON	26	22	48
	JF	0	0	0
	NON ESSELON	7	19	26
	TOTAL JUMLAH	33	41	74

Sumber: Data Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kecamatan Muara Jawa, Juni 2025.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang utama dalam upaya meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Sarana dan Prasarana ini digunakan antara lain:

- Menunjang perkantoran; kegiatan ketatausahaan/administrasi
- Menunjang peningkatan kualitas SDM Aparat;
- Menunjang kegiatan Rapat/ Konsultasi/ Fasilitasi/ Sosialisasi.

Dengan terus berkembangnya IPTEK dan modernisasi zaman, maka penambahan, penggantian, dan penyesuaian sarana dan prasarana tetap saja diperlukan demi menunjang pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Sarana dan Prasarana kerja Kecamatan Muara Jawa sudah memadai namun ada beberapa sarana dan prasarana yang belum menunjang pada bidang masing-masing. Berikut adalah jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Muara Jawa.

Tabel 2. 8. Data Barang Milik Daerah Kecamatan Muara Jawa

No.	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Jalan Desa	667	Baik	
2	Jalan Desa Lain-lain	444	Baik	
3	Jembatan Pada Jalan Desa	150	Baik	
4	Saluran Drainage	101	Baik	
5	Saluran Pengumpul Air Hujan	98	Baik	
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	84	Baik	6 rusak berat

No.	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
7	Bangunan Pembawa Air Kotor Lain-lain	89	Baik	
8	Lap Top	69	Baik	4 rusak berat
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	70	Baik	
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	69	Baik	
11	Sepeda Motor	59	Baik	5 rusak berat
12	P.C Unit	59	Baik	10 rusak berat
13	Kursi Besi/Metal	60	Baik	2 kurang baik
14	Jalan Khusus Lain-lain	59	Baik	1 rusak berat
15	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	51	Baik	
16	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	42	Baik	1 kurang baik
17	A.C. Split	42	Baik	5 rusak berat
18	Instalasi Air Kotor Lain-lain	35	Baik	
19	Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain	34	Baik	
20	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	33	Baik	1 kurang baik
21	Kipas Angin	30	Baik	1 kurang baik
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	29	Baik	
23	Filing Cabinet Besi	25	Baik	2 rusak berat
24	Bangunan Posyandu	24	Baik	
25	Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi)	21	Baik	
26	Jembatan Penyeberangan Orang	19	Baik	
27	Sofa	18	Baik	
28	Jembatan Desa Lain-lain	18	Baik	
29	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	18	Baik	
30	Alat Rumah Tangga Lain-lain	17	Baik	
31	Note Book	15	Baik	3 kurang baik
32	Kursi Rapat	16	Baik	5 kurang baik
33	tanah kampung lainnya (dst)	15	Baik	
34	Sound System	13	Baik	
35	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	13	Baik	
36	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor)	13	Baik	
37	A.C. Window	9	Baik	4 rusak berat
38	Meja Kerja Pejabat lain-lain	11	Baik	2 kurang baik
39	Kursi Tamu	10	Baik	2 kurang baik

No.	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
40	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	12	Baik	
41	Televisi	9	Baik	1 rusak berat
42	Meja Rapat	11	Baik	
43	Lemari Besi/Metal	11	Baik	
44	Kursi Kerja Pejabat lainnya	11	Baik	
45	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	11	Baik	
46	Alat Kantor Lainnya	10	Baik	1 kurang baik
47	Lemari Es	7	Baik	3 rusak berat
48	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	2	Baik	8 rusak berat
49	Mesin Absensi	9	Baik	
50	Layar Film/Projector	8	Baik	1 rusak berat
51	Kursi Rapat Pejabat lainnya	9	Baik	
52	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	9	Baik	
53	Lemari Kaca	8	Baik	
54	Kursi Lipat	8	Baik	
55	Global Positioning System	8	Baik	
56	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	8	Baik	
57	Bangku Tunggu	8	Baik	
58	Air Conditioning (AC)	8	Baik	
59	Wireless	7	Baik	
60	Pagar Permanen	7	Baik	
61	Meubeleur lainnya	6	Baik	1 rusak berat
62	Gordyin/Kray	7	Baik	
63	Gerobak Dorong	7	Baik	
64	CCTV - Camera Control Television System	6	Baik	1 rusak berat
65	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	7	Baik	
66	Unit Power Supply	6	Baik	
67	Uninterrupted Power Supply (UPS)	6	Baik	
68	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	6	Baik	
69	Papan Pengumuman	6	Baik	
70	Lemari Kayu	6	Baik	
71	LCD Projector/Infocus	5	Baik	1 rusak berat

No.	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
72	Jembatan Khusus Lain-lain	6	Baik	
73	Jaringan Distribusi Lain-lain	6	Baik	
74	Jalan Khusus Kompleks	6	Baik	
75	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	5	Baik	5 rusak berat
76	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	5	Baik	
77	Dispenser	5	Baik	1 rusak berat
78	Buffet Kaca	5	Baik	5 rusak berat
79	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	5	Baik	
80	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5	Baik	
81	Tenda	4	Baik	
82	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	Baik	
83	Stabilisator	0	Baik	4 rusak berat
84	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik	1 rusak berat
85	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	4	Baik	
86	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	4	Baik	
87	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	4	Baik	3 rusak berat
88	Kasur/Spring Bed	4	Baik	
89	Jam Elektronik	4	Baik	
90	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain (dst)	4	Baik	
91	Camera Video	4	Baik	1 rusak berat
92	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	4	Baik	
93	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	4	Baik	
94	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Baik	1 rusak berat
95	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	3	Baik	
96	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	3	Baik	
97	Treng Air/Tandon Air	3	Baik	
98	Tangga Aluminium	3	Baik	
99	Tanah Lapangan Sepak Bola	3	Baik	

No.	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
100	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	3	Baik	
101	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	3	Baik	
102	Portable Generating Set	2	Baik	1 rusak berat
103	Microphone/Wireless MIC	1	Baik	2 rusak berat
104	Microphone	3	Baik	
105	Mesin Pemotong Rumput	3	Baik	
106	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik	1 rusak berat
107	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	2	Baik	1 rusak berat
108	Kursi Putar	3	Baik	
109	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Baik	1 rusak berat
110	Jembatan Penyeberangan Kendaraan	3	Baik	
111	Bangunan Waduk a Lain-lain	3	Baik	
112	Bangunan Tempat Parkir	3	Baik	
113	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	3	Baik	
114	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	3	Baik	
115	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	3	Baik	
116	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Bersih/air Baku)	3	Baik	
117	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen	3	Baik	
118	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	3	Baik	
119	Bangunan Dermaga	3	Baik	
120	Audio Amplifier	3	Baik	1 rusak berat
121	Alat Studio Pemetaan lainnya	3	Baik	
122	Video Monitor	2	Baik	
123	Tustel	1	Baik	1 rusak berat
124	Tugu Pembangunan	2	Baik	
125	Tangga	2	Baik	
126	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	2	Baik	
127	Taman lainnya	2	Baik	
128	Rice Cooker (Alat Dapur)	2	Baik	

No.	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
129	Rak Besi	2	Baik	
130	Personal Komputer lainnya	2	Baik	
131	Pagar Lain-lain (dst)	2	Baik	
132	Monomen/Bangunan Bersejarah Lainnya	2	Baik	
133	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik	1 rusak berat
134	Meja Kerja Kayu	2	Baik	
135	Meja 1/2 Biro	2	Baik	
136	Kompas Gas (Alat Dapur)	2	Baik	
137	Jaringan Pembawa Lain-lain	2	Baik	
138	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain- lain	2	Baik	
139	Instalasi Air Sumber / Mata Air Kapasitas Kecil	2	Baik	
140	Hidran Kebakaran	2	Baik	
141	Handy Cam	1	Baik	1 rusak berat
142	Gedung Pos Jaga Permanen	2	Baik	
143	Buku Umum Lain-lain	2	Baik	
144	Brandkas	2	Baik	
145	Bangunan Pengaman Sungai Lainnya	2	Baik	
146	Bangunan penampung sampah	2	Baik	
147	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	2	Baik	
148	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi)	2	Baik	
149	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	2	Baik	
150	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2	Baik	
151	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	2	Baik	
152	Bangunan Gedung Pertokoan Lain- lain (dst)	2	Baik	
153	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2	Baik	
154	Alat Dapur lainnya	2	Baik	1 rusak berat
155	White Board	1	Baik	
156	Video Tape Recorder Stationer	1	Baik	
157	Truck + Attachment	1	Baik	

No.	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
158	Tripod Camera	1	Baik	
159	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	1	Baik	
160	Tempat Tidur Kayu	1	Baik	1 rusak berat
161	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi)	1	Baik	
162	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	1	Baik	
163	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1	Baik	
164	Tanah Kaveling (dst)	1	Baik	
165	Tanah Bangunan Terminal Darat	1	Baik	
166	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1	Baik	
167	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1	Baik	
168	Tanah Bangunan Pasar	1	Baik	
169	Tabung Gas	1	Baik	
170	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Baik	
171	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	1	Baik	
172	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen	1	Baik	
173	Rumah Negara Golongan III Tipe A Semi Permanen	1	Baik	
174	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1	Baik	
175	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	Baik	
176	Rak Kayu	1	Baik	
177	Pompa Air	1	Baik	
178	Pick Up	1	Baik	
179	Photo Tustel	1	Baik	
180	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Baik	
181	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain-lain	1	Baik	
182	Papan Nama Instansi	1	Baik	
183	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	Baik	
184	Mic Conference	1	Baik	

No.	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
185	Mesin Pres	1	Baik	
186	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	Baik	
187	Mesin Ketik Listrik	1	Baik	
188	Meja Tamu Biasa	1	Baik	
189	Meja Resepsionis	1	Baik	
190	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	Baik	
191	Meja Makan Besi	1	Baik	
192	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik	
193	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
194	Meja Kerja	1	Baik	
195	Makam Bersejarah	1	Baik	
196	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	Baik	
197	LCD Monitor	1	Baik	
198	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik	
199	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Baik	
200	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	1	Baik	
201	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	1	Baik	
202	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	
203	Kursi Kayu	1	Baik	
204	Karpet	1	Baik	
205	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1	Baik	
206	Jembatan lainnya	1	Baik	
207	Jaringan Sambungan ke Rumah Lain-lain	1	Baik	
208	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	1	Baik	
209	Jalan Khusus Lainnya	1	Baik	
210	Jalan Kabupaten Lain-lain	1	Baik	
211	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	Baik	
212	Helmet	1	Baik	
213	Hard Disk	1	Baik	
214	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik	
215	Facsimile	1	Baik	
216	External	1	Baik	

No.	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
217	excavator lainnya (dst)	1	Baik	
218	Dump Truck	1	Baik	
219	Coffee Maker	1	Baik	
220	Clip, Selang & Octopus	1	Baik	
221	Camera Digital	1	Baik	
222	Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan	1	Baik	
223	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1	Baik	
224	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	1	Baik	
225	Bangunan Pengamanan Air Kotor Lain-lain	1	Baik	
226	Bangunan Pengaman Pengembangan Lain-lain	1	Baik	
227	Bangunan Pembawa Pengaman Pantai	1	Baik	
228	Bangunan Olah Raga Terbuka Darurat	1	Baik	
229	Bangunan Kolam/Bak Ikan	1	Baik	
230	Bangunan Klinik/Puskesmas	1	Baik	
231	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Air Kotor)	1	Baik	
232	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	1	Baik	
233	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Darurat	1	Baik	
234	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	1	Baik	
235	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	Baik	
236	Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain (dst)	1	Baik	
237	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain (dst)	1	Baik	
238	Bangunan air irigasi lainnya	1	Baik	
239	Baju Tahan Api	1	Baik	

No.	Jenis Aset	Jumlah	Kondisi	Keterangan
240	Audio Visual	1	Baik	
241	Alat Studio Lainnya	1	Baik	
242	Alat Sidik Jari	1	Baik	
243	Alat Penghancur Kertas	1	Baik	
244	Alat Pencacah Hijauan	1	Baik	
245	alat eksplorasi topografi lainnya lainnya (dst)	1	Baik	
246	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1	Baik	
Jumlah		3226		

Sumber: Data Pengurus Barang Milik Daerah Kecamatan Muara Jawa, Juni 2025.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Muara Jawa menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada Masyarakat.

Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa, Kelurahan karena keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pelayanan pada Kecamatan Muara Jawa yang menggambarkan tugas fungsi Perangkat Daerah selaras dengan RPJMD. Capaian Kinerja Kecamatan Muara Jawa berdasarkan tujuan, sasaran dan target rencana strategis Kecamatan Muara Jawa pada periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Jawa

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
INDIKATOR TUJUAN															
Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	61	62	64	65	67	104,12	89,73	91,76	-	-	170,69	144,73	143,38	-	-
INDIKATOR SASARAN															
Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	55	60	65	70	75	55	89,73	100	-	-	100,00	149,55	153,85	-	-
Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	82,35	83,00	84,00	84,00	85,00	100	100	100	-	-	121,43	120,48	119,05	-	-
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	15	20	25	30	35	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, dan SUBKEGIATAN															
Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	80	80	85	85	95	95	100	100	-	-	118,75	125,00	117,65	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	75	87,5	87,5	100	100	87,5	100	100	-	-	116,67	114,29	114,29	-	-
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	n/a	2	2	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	n/a	n/a	n/a	2	2	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-
Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1	14	5	5	4	1	14	5	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	141	370	392	226	38	141	370	392	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan yang aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	51	51	154	298	144	51	51	154	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	48	68	55	42	32	48	68	55	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	204	302	151	95	103	204	302	151	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2	2	392	2	2	2	2	2	-	-	100,00	100,00	0,51	-	-
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	222	304	167	97	105	214	304	167	-	-	96,40	100,00	100,00	-	-
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	204	302	151	95	103	204	302	151	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18	2	16	2	2	10	2	16	-	-	55,56	100,00	100,00	-	-
Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	-	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	100,00	-	-	-
Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	n/a	n/a	n/a	4	4	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-
Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	100	100	100	n/a	100	100	-	-	n/a	100,00	100,00	-	-
Jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan	n/a	2	1	1	2	n/a	2	1	-	-	n/a	100,00	100,00	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	n/a	460	600	775	760	n/a	460	600	-	-	n/a	100,00	100,00	-	-
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	n/a	4	-	-	2	n/a	4	-	-	-	n/a	100,00	-	-	-
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61	62	64	65	67	n/a	69,2	49,32	57,51	-	n/a	111,61	77,06	88,48	-
Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	20	34	7	8	9	18	26	-	-	100,00	90,00	76,47	-	-
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	6	16	3	2	9	6	8	-	-	100,00	100,00	50,00	-	-
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n/a	n/a	n/a	1	0	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	n/a	n/a	n/a	1	0	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	12	18	0	3	2	12	18	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	0	1	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-
Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	2	2	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-
Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	0	0	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	18	18	14	14	14	14	14	14	-	-	77,7 8	77,7 8	100, 00	-	-
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1032	1032	1032	1540	1862	1032	1032	1032	-	-	100, 00	100, 00	100, 00	-	-
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	n/a	n/a	4	n/a	n/a	n/a	n/a	4	-	-	n/a	n/a	100, 00	-	-
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100, 00	100, 00	100, 00	-	-
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	n/a	2	2	2	n/a	n/a	2	2	-	-	n/a	100, 00	100, 00	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17	17	17	12	12	14	14	14	-	-	82,3 5	82,3 5	82,3 5	-	-
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	1017	1017	5787	5857	5883	1017	1017	5787	-	-	100, 00	100, 00	100, 00	-	-
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100, 00	100, 00	100, 00	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	n/a	n/a	n/a	1	0	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	n/a	1	1	1	n/a	n/a	1	-	-	n/a	n/a	100,00	-	-
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	1	n/a	n/a	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
Jumlah Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian	86	86	86	137	150	82	78	74	-	-	95,35	90,70	86,05	-	-
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	1	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	83	310	n/a	n/a	n/a	83	310	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a	n/a	n/a

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	10	3	n/a	n/a	10	10	3	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140	140	n/a	n/a	n/a	140	140	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	10	10	n/a	5	20	10	10	n/a	-	n/a	n/a	100,00	n/a	-
Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	9	11	11	9	9	9	11	11	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	6	6	7	6	9	6	6	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	9	9	9	1	n/a	9	9	-	-	n/a	100,00	100,00	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a	1	1	1	1	n/a	1	1	-	-	n/a	100,00	100,00	-	-
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	9	9	27	27	9	9	9	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9	9	9	8	9	9	9	9	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1	1	1	n/a	n/a	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00	n/a	n/a
Jumlah Paket Bahan/Material	1	1	1	1	n/a	1	1	1	-	n/a	100,00	100,00	100,00	-	n/a
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1	n/a	1	1	1	1	n/a	-	100,00	100,00	100,00	n/a	-
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506	684	718	627	375	506	684	718	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	83	180	3	28	2	83	180	3	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8	2	n/a	2	1	8	2	n/a	-	-	100,00	100,00	n/a	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	71	163	2	24	n/a	71	163	2	-	n/a	100,00	100,00	100,00	-	n/a
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	14	n/a	1	n/a	3	14	n/a	-	n/a	100,00	100,00	n/a	-	n/a
Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	168	269	602	232	155	168	269	602	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah dan jenis kendaraan perorangan/Jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	n/a	n/a	-	-	n/a	n/a	n/a	-	-
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	22	47	35	20	33	22	47	35	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah dan jenis Alat Besar yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	95	112	280	160	118	95	112	280	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	50	101	280	50	n/a	50	101	280	-	n/a	100,00	100,00	100,00	-	n/a

Indikator Kinerja	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	8	6	n/a	2	n/a	8	6	n/a	-	n/a	100,00	100,00	n/a	-

Sumber : Data Kecamatan Muara Jawa, Tahun 2025.

Dari tabel 2.9 dapat dilihat bahwa salah satu Indikator Kinerja Utama Kecamatan berupa Pertumbuhan Pendapatan Asli kewenangan Kecamatan tidak terealisasi sejak tahun 2020 disebabkan dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan ijin secara online melalui aplikasi simbg.pu.go.id sehingga tidak ada lagi penerbitan IMB dan pemungutan retribusinya di Kecamatan. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama lainnya dapat mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain:

- Ketersediaan anggaran yang cukup dari APBD;
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Muara Jawa untuk dapat memenuhi target dari masing-masing Seksi dan Subbagian, serta Kelurahan;
- Adanya kerjasama Tim seluruh aparatur di lingkup Kecamatan Muara Jawa.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Angg aran	Realis asi
KECAMATAN MUARA JAWA	60.203 .127.6 30,00	101.97 4.372. 628,00	97.128 .231.0 18,00	83.871 .463.7 78,00	54.412 .725.1 38,00	56.654 .806.9 32,00	96.903 .527.2 68,00	93.149 .572.7 02,00	-	-	94, 11	95, 02	95, 90	0	0	20	20
UNSUR KEWILAYAHAN : KECAMATAN																	
PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.812 .461.4 48,00	53.329 .369.9 42,00	53.284 .809.0 00,00	40.451 .441.7 87,75	12.649 .650.0 00,00	19.405 .051.5 89,00	51.554 .574.2 79,00	52.195 .110.6 84,00	-	-	97, 94	96, 67	97, 95	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	Angg aran	Realis asi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	380.12 1.850, 00	450.00 0.000, 00	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	0,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	99.658 .850,0 0	225.00 0.000, 00	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	0,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	280.46 3.000, 00	225.00 0.000, 00	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	0,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Wilayah Kecamatan																	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19.812 .461.4 48,00	53.329 .369.9 42,00	53.284 .809.0 00,00	40.071 .319.9 37,75	12.199 .650.0 00,00	19.405 .051.5 89,00	51.554 .574.2 79,00	52.195 .110.6 84,00	-	-	97, 94	96, 67	97, 95	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	74.921 .990,0 0	2.674. 369.94 2,00	1.471. 094.00 0,00	1.490. 723.00 0,00	1.469. 650.00 0,00	-	1.586. 016.83 4,00	1.370. 855.99 1,00	-	-	0,0 0	59, 30	93, 19	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	19.737	50.655	51.813	38.580	10.730	19.405	49.968	50.824	-	-	98, 32	98, 64	98, 09	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	.539.4 58,00	.000.0 00,00	.715.0 00,00	.596.9 37,75	.000.0 00,00	.051.5 89,00	.557.4 45,00	.254.6 93,00									
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.894 .820.7 03,00	24.704 .991.0 00,00	21.793 .760.8 77,00	21.659 .702.7 10,00	20.581 .000.0 00,00	19.148 .430.2 53,00	24.031 .523.3 94,00	21.239 .661.7 65,00	-	-	91, 64	97, 27	97, 46	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13.621 .544.2 03,00	15.397 .680.0 00,00	14.916 .887.0 00,00	7.104. 174.46 0,00	6.154. 000.00 0,00	12.786 .836.8 19,00	15.272 .914.7 94,00	14.714 .224.2 65,00	-	-	93, 87	99, 19	98, 64	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	56.125 .000,0 0	84.000 .000,0 0	147.65 0.000, 00	170.88 3.100, 00	84.000 .000,0 0	55.685 .000,0 0	68.646 .000,0 0	140.71 2.600, 00	-	-	99, 22	81, 72	95, 30	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.980. 489.20 3,00	7.169. 000.00 0,00	6.034. 237.00 0,00	5.200. 000.00 0,00	3.600. 000.00 0,00	4.928. 071.59 5,00	7.141. 927.79 4,00	5.971. 189.05 5,00	-	-	98, 95	99, 62	98, 96	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8.484. 930.00 0,00	7.994. 680.00 0,00	8.585. 000.00 0,00	1.684. 835.96 0,00	2.400. 000.00 0,00	7.781. 880.22 4,00	7.992. 391.00 0,00	8.475. 452.61 0,00	-	-	91, 71	99, 97	98, 72	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Evaluasi Kelurahan	100.00 0.000, 00	150.00 0.000, 00	150.00 0.000, 00	48.455 .400,0 0	70.000 .000,0 0	21.200 .000,0 0	69.950 .000,0 0	126.87 0.000, 00	-	-	21, 20	46, 63	84, 58	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Pemberdayaan Lembaga	7.273.	9.307.	6.876.	14.555	14.427	6.361.	8.758.	6.525.	-	-	87, 47	94, 10	94, 89	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	276.50 0,00	311.00 0,00	873.87 7,00	.528.2 50,00	.000.0 00,00	593.43 4,00	608.60 0,00	437.50 0,00									
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	7.122. 976.50 0,00	8.758. 400.00 0,00	6.726. 873.87 7,00	14.368 .547.2 50,00	14.327 .000.0 00,00	6.243. 745.40 0,00	8.278. 628.60 0,00	6.427. 683.50 0,00	-	-	87, 66	94, 52	95, 55	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	150.30 0.000, 00	150.00 0.000, 00	150.00 0.000, 00	186.98 1.000, 00	100.00 0.000, 00	117.84 8.034, 00	99.890 .000,0 0	97.754 .000,0 0	-	-	78, 41	66, 59	65, 17	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan	-	398.91 1.000, 00	-	-	-	-	380.09 0.000, 00	-	-	-	0,0 0	95, 28	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	172.55 7.500, 00	125.00 0.000, 00	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	0,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	172.55 7.500, 00	125.00 0.000, 00	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	0,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
vertikal di wilayah kecamatan																	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	172.55 7.500, 00	125.00 0.000, 00	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00 0	0,0 0	20,0 0	0,00
PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	1.112. 935.00 0,00	1.115. 612.00 0,00	693.63 7.450, 00	335.00 0.000, 00	-	1.004. 839.20 0,00	1.074. 524.50 0,00	-	-	0,0 0	90, 29	96, 32	0,00 0	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	-	1.112. 935.00 0,00	1.115. 612.00 0,00	693.63 7.450, 00	335.00 0.000, 00	-	1.004. 839.20 0,00	1.074. 524.50 0,00	-	-	0,0 0	90, 29	96, 32	0,00 0	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Penugasan Kepala Daerah																	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	1.087.935.000,00	1.090.612.000,00	693.637.450,00	260.000.000,00	-	1.004.839.200,00	1.049.546.500,00	-	-	0,00	92,36	96,23	0,00	0,00	20,00	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	25.000 .000	25.000 .000	-	75.000 .000	-	-	24.978 .000	-	-	0,0 0	0,0 0	99, 91	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	19.495 .845.4 79,00	22.827 .076.6 86,00	20.934 .049.1 41,00	20.894 .124.3 30,25	20.722 .075.1 38,00	18.101 .325.0 90,00	20.312 .590.3 95,00	18.640 .275.7 53,00	-	-	92, 85	88, 98	89, 04	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.600 .000,0 0	450.00 0.000, 00	150.00 0.000, 00	181.34 0.540, 00	340.00 0.000, 00	19.830 .000,0 0	142.33 7.000, 00	21.808 .425,0 0	-	-	27, 31	31, 63	14, 54	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000 .000,0 0	425.00 0.000, 00	100.00 0.000, 00	59.927 .720,0 0	40.000 .000,0 0	18.780 .000,0 0	142.33 7.000, 00	19.658 .425,0 0	-	-	37, 56	33, 49	19, 66	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	2.263. 000,00	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	-	-	-	2.263. 000,00	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	0,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	Angg aran	Realis asi
Perubahan RKA- SKPD																	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.600 .000,0 0	25.000 .000,0 0	50.000 .000,0 0	-	30.000 .000,0 0	1.050. 000,00	-	2.150. 000,00	-	-	4,6 5	0,0 0	4,3 0	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	20.000 .000,0 0	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	0,00
Pelaksanaan Pengumpulan Data	-	-	-	116.88	250.00	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	0,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Statistik Sektoral Daerah				6.820, 00	0.000, 00												
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.509 .455.6 63,00	10.968 .107.7 76,00	13.407 .011.1 29,00	14.885 .167.4 35,00	16.217 .892.4 20,00	10.063 .854.2 25,00	9.511. 336.95 9,00	12.411 .846.6 43,00	-	-	95, 76	86, 72	92, 58	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.024 .895.6 63,00	10.449 .067.7 76,00	12.599 .123.7 19,00	14.413 .827.2 35,00	15.731 .492.4 20,00	9.633. 694.22 5,00	9.200. 866.95 9,00	11.690 .679.2 33,00	-	-	96, 10	88, 05	92, 79	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		288.84 7.410, 00	-	-	-	-	288.84 7.410, 00	-	-	0,0 0	0,0 0	100 ,00	0,00	0,0 0	19,0 1	20,00
Koordinasi dan Penyusunan	15.000	15.000	15.000	9.940. 200,00	25.000	5.960. 000,00	1.810. 000,00	1.640. 000,00	-	-	39, 73	7,2 4	10, 93	0,00	0,0 0	17,7 8	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	.000,0 0	.000,0 0	.000,0 0		.000,0 0												
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		25.000 .000,0 0	25.000 .000,0 0				-	-			0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0,00	0,0 0	1,98	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	469.56 0.000, 00	479.04 0.000, 00	479.04 0.000, 00	461.40 0.000, 00	461.40 0.000, 00	424.20 0.000, 00	308.66 0.000, 00	430.68 0.000, 00	-	-	90, 34	64, 43	89, 90	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyusunan Pelaporan dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	128.45 0.000, 00	130.20 0.000, 00	130.20 0.000, 00	233.63 7.500, 00	130.20 0.000, 00	124.21 7.000, 00	126.00 0.000, 00	128.72 0.000, 00	-	-	96, 70	96, 77	98, 86	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	11.976 .000,0 0	25.000 .000,0 0	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	0,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	73.250 .000,0 0	75.000 .000,0 0	75.000 .000,0 0	142.56 3.500, 00	50.000 .000,0 0	69.017 .000,0 0	70.800 .000,0 0	73.520 .000,0 0	-	-	94, 22	94, 40	98, 03	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	23.898 .000,0 0	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.200 .000,0 0	55.200 .000,0 0	55.200 .000,0 0	55.200 .000,0 0	55.200 .000,0 0	55.200 .000,0 0	55.200 .000,0 0	55.200 .000,0 0	-	-	100 ,00	100 ,00	100 ,00	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	333.35 0.000, 00	642.27 6.000, 00	130.00 0.000, 00	-	50.000 .000,0 0	84.230 .000,0 0	428.28 8.892, 00	65.276 .668,0 0	-	-	25, 27	66, 68	50, 21	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000 .000,0 0	10.000 .000,0 0	-	-	-	8.900. 000,00	9.800. 000,00	-	-	-	89, 00	98, 00	0,0 0	0,00 0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000 .000,0 0	242.27 6.000, 00	-	-	-	50.000 .000,0 0	240.65 0.000, 00	-	-	-	100 ,00	99, 33	0,0 0	0,00 0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.800 .000,0 0	100.00 0.000, 00	30.000 .000,0 0	-	-	16.430 .000,0 0	51.553 .612,0 0	12.852 .808,0 0	-	-	16, 46	51, 55	42, 84	0,00 0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Sosialisasi Peraturan	123.55	140.00	-	-	-	3.400. 000,00	-	-	-	-	2,7 5	0,0 0	0,0 0	0,00 0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Perundang- Undangan	0.000, 00	0.000, 00															
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	50.000 .000,0 0	150.00 0.000, 00	100.00 0.000, 00	- -	50.000 .000,0 0	5.500. 000,00	126.28 5.280, 00	52.423 .860,0 0	- -	- -	11, 00	84, 19	52, 42	0,00 0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.299. 648.07 5,00	1.520. 579.00 0,00	2.160. 145.29 4,00	1.177. 079.33 1,25	731.67 6.000, 00	1.128. 012.01 6,00	1.392. 187.37 4,00	1.622. 175.57 5,00	- -	- -	86, 79	91, 56	75, 10	0,00 0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyediaan Komponen Instalasi	42.524 .540,0 0	58.650 .000,0 0	137.15 0.000, 00	36.650 .000,0 0	60.150 .000,0 0	42.399 .600,0 0	58.560 .500,0 0	53.377 .000,0 0	- -	- -	99, 71	99, 85	38, 92	0,00 0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.40 3.540, 00	258.53 7.300, 00	471.03 7.300, 00	188.47 4.540, 00	25.000 .000,0 0	189.57 5.300, 00	255.20 1.500, 00	463.74 4.700, 00	-	-	99, 04	98, 71	98, 45	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000 .000,0 0	25.000 .000,0 0	25.000 .000,0 0	25.000 .000,0 0	10.000 .000,0 0	23.705 .000,0 0	24.880 .000,0 0	24.680 .000,0 0	-	-	94, 82	99, 52	98, 72	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	329.46 7.100, 00	400.52 8.000, 00	432.00 0.000, 00	327.18 3.500, 00	207.59 3.500, 00	308.02 0.210, 00	388.03 7.500, 00	426.36 8.100, 00	-	-	93, 49	96, 88	98, 70	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.072 .636,0 0	69.962 .700,0 0	97.757 .700,0 0	27.589 .840,0 0	37.043 .000,0 0	49.683 .250,0 0	68.579 .200,0 0	97.351 .600,0 0	-	-	97, 28	98, 02	99, 58	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.500. 000,00	2.500. 000,00	2.500. 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	0,00
Penyediaan Bahan/Material	25.000 .000,0 0	25.000 .000,0 0	25.000 .000,0 0	19.153 .951,2 5	-	16.227 .000,0 0	24.965 .000,0 0	23.847 .000,0 0	-	-	64, 91	99, 86	95, 39	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	30.000	35.000	30.000	-	20.000	17.450	15.800	-	-	-	58, 17	45, 14	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Angg aran	Realis asi
	.000,0 0	.000,0 0	.000,0 0		.000,0 0	.000,0 0	.000,0 0										
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	543.47 7.000, 00	560.40 1.000, 00	854.70 0.294, 00	478.07 8.000, 00	296.94 0.000, 00	429.95 7.656, 00	487.20 7.674, 00	483.52 7.175, 00	-	-	79, 11	86, 94	56, 57	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000 .000,0 0	50.000 .000,0 0	50.000 .000,0 0	39.949 .500,0 0	39.949 .500,0 0	26.654 .000,0 0	45.220 .000,0 0	49.280 .000,0 0	-	-	88, 85	90, 44	98, 56	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	29.203 .259,0 0	35.000 .000,0 0	35.000 .000,0 0	35.000 .000,0 0	35.000 .000,0 0	24.340 .000,0 0	23.736 .000,0 0	-	-	-	83, 35	67, 82	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Berbasis Elektronik pada SKPD																	
Pengadaan Barang Milik Daerah	1.645.	3.856.	190.00	413.15	150.00	1.537.	3.814.	187.68			93,	98,	98,	0,00	0,0	20,0	20,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	605.57 4,00	388.62 5,00	0.000, 00	5.000, 00	0.000, 00	154.42 0,00	762.79 4,00	0.000, 00	-	-	41	92	78	0,00	0	0	20,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	315.68 0.000, 00	-	-	-	-	294.90 0.000, 00	-	-	-	0,0 0	93, 42	0,0 0	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	425.00 0.000, 00	182.76 0.000, 00	180.00 0.000, 00	45.670 .000,0 0	100.00 0.000, 00	346.62 0.000, 00	182.58 0.000, 00	177.68 0.000, 00	-	-	81, 56	99, 90	98, 71	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	Angg aran	Realis asi
Pengadaan mebel	155.99 9.120, 00	257.34 3.625, 00	-	40.000 .000,0 0	50.000 .000,0 0	142.05 4.000, 00	255.03 0.000, 00	-	-	-	91, 06	99, 10	0,0 0	0,00 0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	701.87 2.554, 00	1.250. 605.00 0,00	10.000 .000,0 0	127.48 5.000, 00	-	689.68 5.320, 00	1.234. 897.00 0,00	10.000 .000,0 0	-	-	98, 26	98, 74	0,0 0	0,00 0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	362.73 3.900, 00	1.850. 000.00 0,00	-	200.00 0.000, 00	-	358.79 5.100, 00	1.847. 355.79 4,00	-	-	-	98, 91	99, 86	0,0 0	0,00 0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00 0,00	0,0 0	0,00	0,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	Angg aran	Realis asi
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.941. 487.22 0,00	3.239. 994.01 2,00	3.372. 506.01 2,00	3.011. 560.02 4,00	2.381. 856.71 8,00	2.735. 256.42 9,00	3.034. 184.72 9,00	3.208. 431.77 4,00	-	-	92, 99	93, 65	95, 13	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.440 .000,0 0	60.998 .000,0 0	77.350 .000,0 0	62.990 .000,0 0	6.500. 000,00	27.227 .000,0 0	57.752 .000,0 0	76.480 .000,0 0	-	-	99, 22	94, 68	98, 88	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	932.41 9.520, 00	1.100. 000.00 0,00	1.100. 000.00 0,00	1.562. 920.39 4,00	1.462. 920.39 4,00	904.99 9.953, 00	1.019. 955.58 5,00	984.93 8.398, 00	-	-	97, 06	92, 72	89, 54	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.981. 627.70 0,00	2.078. 996.01 2,00	2.195. 156.01 2,00	1.385. 649.63 0,00	912.43 6.324, 00	1.803. 029.47 6,00	1.956. 477.14 4,00	2.147. 013.37 6,00	-	-	90, 99	94, 11	97, 81	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.565. 248.94 7,00	2.019. 531.27 3,00	1.394. 186.70 6,00	992.18 4.500, 00	720.45 0.000, 00	2.408. 771.00 0,00	1.863. 492.64 7,00	994.33 6.668, 00	-	-	93, 90	92, 27	71, 32	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	-	-	7.000. 000,00	50.000 .000,0 0	50.000 .000,0 0	-	-	6.445. 000,00	-	-	0,0 0	0,0 0	92, 07	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	367.36 5.000, 00	416.16 5.000, 00	527.34 0.000, 00	470.00 0.000, 00	301.00 0.000, 00	328.28 2.700, 00	338.01 4.593, 00	248.52 0.668, 00	-	-	89, 36	81, 22	47, 13	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000	68.123	14.713	18.978	-	-	90, 83	19, 62	25, 30	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	.000,0 0	.000,0 0	.000,0 0	.000,0 0	.000,0 0	.450,0 0	.459,0 0	.000,0 0									
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.49 0.480, 00	112.29 0.000, 00	150.55 0.000, 00	122.95 0.000, 00	119.45 0.000, 00	100.32 7.000, 00	107.69 7.000, 00	136.96 0.000, 00	-	-	97, 89	95, 91	90, 97	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.00 0.000, 00	302.32 0.000, 00	200.00 0.000, 00	299.23 4.500, 00	-	292.53 6.800, 00	291.26 8.000, 00	196.68 0.000, 00	-	-	97, 51	96, 34	98, 34	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.639. 003.46 7,00	1.113. 756.27 3,00	434.29 6.706, 00	-	200.00 0.000, 00	1.619. 501.05 0,00	1.111. 799.59 5,00	386.75 3.000, 00	-	-	98, 81	99, 82	89, 05	0,00	0,0 0	20,0 0	20,00

Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Persentase Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rasio Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	Angg aran	Realis asi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.390.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Sumber : Data Kecamatan Muara Jawa, 2025

Dari Tabel 2.10 dapat dilihat secara umum bahwa Kecamatan Muara Jawa menunjukkan manajemen anggaran yang baik setiap tahunnya, yang terlihat dari tingkat realisasi anggaran diatas 90%, dengan rasio pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Muara Jawa cukup baik dalam pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain:

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target;
- Kerjasama tim pengelola anggaran dan kegiatan yang cukup baik di Kecamatan maupun Kelurahan.

2.1.4 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan Kecamatan Muara Jawa bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Muara Jawa maupun yang berada di luar wilayah kecamatan Muara Jawa antara lain:

- a. Polisi Sektor (Polsek) Muara Jawa, untuk menyediakan layanan keamanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di Masyarakat;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) Muara Jawa, untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial Masyarakat;
- c. Kantor Urusan Agama (KUA), untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu jika pernikahan mendadak ingin dilakukan dari batas waktu pengurusan administrasi yang sudah ditentukan;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat, pemerintah Kecamatan Muara Jawa bekerjasama dengan Satpol PP baik secara langsung berupa bantuan personal Satpol PP bila ada kegiatan penertiban, maupun secara tidak langsung berupa fasilitasi pelatihan bagi tenaga Linmas Kecamatan;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Kerjasama dengan Kesbangpol dalam pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, mereka juga bertugas memfasilitasi kerukunan antar umat beragama, memantau situasi politik, mengelola organisasi masyarakat, dan menangani kewaspadaan dini serta penanganan konflik di tingkat lokal;

- f. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, pencegahan bahaya, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Kemitraan ini mencakup pelaksanaan patroli dan inspeksi rutin, penyiapan rencana darurat, pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di tingkat kecamatan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai keselamatan kebakaran;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melakukan berbagai aspek penanggulangan bencana, terutama meliputi penyusunan dan sosialisasi peta rawan bencana, edukasi dan simulasi kesiapsiagaan masyarakat, pemantauan serta pelaporan situasi kebencanaan, pelaksanaan tanggap darurat, hingga pengelolaan logistik dan rehabilitasi pascabencana;
- h. Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah (BPKAD). Hubungan kerja antara kecamatan dan BPKAD bersifat hierarkis dan koordinatif, di mana kecamatan sebagai unit pelaksana di tingkat bawah bertanggung jawab atas pengawasan dan administrasi di wilayahnya, sementara BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) adalah badan pelaksana di tingkat kabupaten/kota yang mengelola keuangan dan aset daerah, serta memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah
- i. Dinas Pertanian dan Perkebunan, Memberikan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan kepada petani dan peternak di tingkat kecamatan untuk meningkatkan produksi, kualitas hasil, dan teknologi pertanian, menampung aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk perumusan perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dalam hal pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dengan fokus pada ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga, perumusan kebijakan, fasilitasi data gender, pembinaan lembaga, penguatan partisipasi masyarakat, advokasi, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak;
- k. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) umum perumahan, pengembangan kawasan permukiman dan desa, fasilitasi pengadaan tanah untuk perumahan, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui program-program pemerintah;

- l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK0), melakukan pengawasan operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengembangan kemitraan dengan pihak lain untuk pengelolaan sampah yang efektif, dan Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penanganan dan pengurangan sampah di lingkungan mereka;
- m. Dinas Kesehatan. Hubungan kerja antara kecamatan dan dinas kesehatan bersifat hierarkis dan koordinatif, di mana dinas kesehatan kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan program kesehatan di tingkat kecamatan di fasilitas Kesehatan yang ada di Kecamatan yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Kecamatan berperan dalam mendukung dan mengimplementasikan program tersebut di wilayahnya, terutama melalui Puskesmas yang menjadi fasilitas kesehatan terdepan di tingkat kecamatan, dan Camat memastikan lingkungan yang sehat serta mengkoordinasikan kegiatan kesehatan di wilayahnya. Kecamatan juga bekerja sama dengan Puskesmas dan lembaga lainnya untuk memastikan Posyandu balita, lansia, dan posbindu dapat berjalan optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, seperti imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak dan ibu hamil. ;
- n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Hubungan kerja antara kecamatan dan dinas pendidikan bersifat struktural dan fungsional, di mana dinas pendidikan adalah pelaksana teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan di tingkat kabupaten, sementara kecamatan adalah perpanjangan tangan dinas di tingkat wilayahnya untuk pelayanan dan pengawasan. Hubungan ini diwujudkan melalui: unit pelaksana teknis (UPT) pendidikan kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan dinas di kecamatan dan koordinator wilayah (korwil) kecamatan bidang pendidikan yang ditunjuk oleh dinas pendidikan
- o. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk memberikan berbagai pelayanan kepada kecamatan, terutama dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Bappeda juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah kecamatan Muara Jawa berjalan dengan baik dan terarah;
- p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa/Kelurahan dan koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan. DPMD juga memberikan pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan terhadap berbagai program dan kegiatan di tingkat desa dan Kelurahan;

- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula;
- r. Inspektorat Kabupaten, untuk Kecamatan yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta Evaluasi kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan. Inspektorat juga menyediakan layanan konsultasi dari Kecamatan;
- s. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), mitra kerja pelayanan di Kecamatan yaitu meliputi tugas pemungutan, pelayanan, dan sosialisasi pajak daerah;
- t. Dinas Sosial (Dinsos), mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada Masyarakat;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM), mitra kerja terkait UMKM dalam bentuk pembinaan, seperti pelatihan, bantuan permodalan, pendampingan izin usaha, serta fasilitas pengembangan dan perlindungan usaha;
- v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Hubungan kerja antara kecamatan dan Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) bersifat koordinatif dan suportif. Kecamatan berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator di tingkat daerah, sementara Disperindag adalah instansi pelaksana yang memiliki kewenangan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan di tingkat kabupaten. Keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti pembinaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan pasar lokal.
- w. Dinas Pekerjaan Umum (PU). Bekerjasama dalam mengidentifikasi dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan Masyarakat seperti jalan, jembatan, drainase, bangunan/Gedung dalam skala besar yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kecamatan;
- x. Dinas Perhubungan (Dinas Perhubungan), mitra kerja yaitu terkait dengan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan sarana prasarana transportasi pada wilayah Kecamatan;
- y. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), mitra kerja dalam hal menyampaikan informasi pembangunan, pengelolaan data statistik, pelaksanaan komunikasi publik, fasilitasi kehumasan, serta dalam penerapan dan pengawasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pelayanan publik dan melaksanakan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang informasi dan komunikasi publik, serta meningkatkan literasi informasi dan teknologi masyarakat melalui program yang dijalankan bersama aparatur kecamatan, kelurahan dan desa, Diskominfo juga membantu dalam pemenuhan peralatan dan perlengkapan terkait jaringan internet kecamatan, dan kecamatan sebagai pusat data.

- z. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus). Dinas kearsipan bertugas membina dan mengawasi pengelolaan kearsipan di tingkat daerah (termasuk kecamatan) sesuai peraturan perundang-undangan, sementara kecamatan bertugas melaksanakan pengelolaan arsip di tingkatnya sendiri sebagai bagian dari tanggung jawab administrasi dan pelayanan publik, dengan bimbingan teknis dari dinas kearsipan.
- aa. Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora). Hubungan kerja antara kecamatan dengan Dispora bersifat kolaboratif dan sinergis, di mana kecamatan berperan sebagai garda terdepan dalam implementasi program di tingkat lokal, sementara Dispora memberikan pembinaan, dukungan teknis, dan sumber daya dari tingkat kabupaten. Kecamatan melaporkan kegiatan olahraga dan kepemudaan kepada Dispora, serta menerima program dan arahan kebijakan untuk dilaksanakan di wilayahnya;
- bb. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di tingkat Kecamatan, meliputi berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pelaksanaan program PKK, bimbingan kepada kelompok PKK di Tingkat RT. TP PKK Kecamatan juga berperan dalam menginformasikan program-program PKK kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Diadakan Sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat mengenai pencegahan stunting di wilayah Kecamatan Muara Jawa;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Hubungan antara kecamatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersifat koordinatif, di mana kecamatan bertindak sebagai perpanjangan tangan Disnakertrans di tingkat lokal untuk mengimplementasikan kebijakan ketenagakerjaan, sementara Disnaker adalah instansi pelaksana kebijakan di tingkat kabupaten/kota. Kecamatan sering menjadi titik kontak awal bagi masyarakat terkait urusan ketenagakerjaan, seperti pendaftaran pencari kerja atau penanganan awal masalah, sebelum diteruskan ke Disnakertrans untuk penanganan lebih lanjut.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Masyarakat Kecamatan Muara Jawa sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang tepat dan bermutu sebagaimana tercantum dalam sasaran Kecamatan Muara Jawa adalah “Meningkatnya layanan administrasi Kecamatan”. Pelayanan tepat dan bermutu dapat dicapai dengan kemauan yang tinggi dari seluruh aparaturnya Kecamatan Muara Jawa yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Jawa. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Muara Jawa dapat dirumuskan permasalahan di wilayah ini. Permasalahan kecamatan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal yaitu pokok masalah, masalah, dan akar masalah.

Tabel 2. 11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Muara Jawa

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Pelayanan Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Kurangnya pemahaman Kebijakan/Regulasi baik berupa delegasi maupun pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
		Masih minimnya infrastruktur yang mendukung dalam pelayanan publik khususnya berbasis digital
		Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		<p>khusus dalam memberikan pelayanan</p> <p>Kurangnya harmonisasi kebijakan lintas sektor yang berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik.</p> <p>Sosialisasi kebijakan atau program kecamatan yang belum merata</p> <p>Adanya hambatan proses pencetakan e-KTP karena alat cetak rusak</p>
	<p>Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan</p>	<p>Tumpang tindih kebijakan antara kecamatan dan kabupaten (perangkat daerah teknis)</p> <p>Rendahnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan program lintas sektoral.</p> <p>Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.</p> <p>Belum optimalnya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan</p>

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Belum optimalnya koordinasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait
		Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
		Keterbatasan infrastruktur teknologi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan
		Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang rendah sehingga terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
		Keterbatasan akses jalan menuju kantor kecamatan atau desa tertentu
		Belum tersedianya transportasi umum yang memadai untuk menuju kecamatan, hanya tersedia moda transportasi antar kota.
		Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pembinaan koperasi dan UMKM bersama dengan dinas teknis
		Belum optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan desa yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas daerah dan nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, stunting, dll
		Kerusakan ekosistem akibat penambangan batubara ilegal di sekitar Muara Jawa
	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Minimnya pelaksanaan forum atau pertemuan rutin untuk membahas program lintas sektoral di tingkat kecamatan
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di kecamatan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengawasan internal pemda.
		Kekurangan staf yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis.
		Kurangnya pelatihan bagi perangkat

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		kecamatan tentang pengelolaan administrasi modern, termasuk pengelolaan keuangan.
		Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program yang diselenggarakan kecamatan
		Tidak adanya sistem pencatatan data yang terintegrasi secara real-time.
		Lemahnya pengawasan dan verifikasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Sumber: Hasil analisis,2025.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penentuan isu strategis Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara mempertimbangkan permasalahan, isu KLHS, serta isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional).

Sebelum perumusan isu strategis kecamatan, berikut ini dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan program prioritas kepala daerah, dan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, serta beberapa aspek lainnya.

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan dimulai dengan merumuskan Visi, Misi, dan nilai-nilai. Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai instansi, memiliki orientasi ke depan agar dapat eksis, bersifat antisipatif, dan inovatif.

Adapun Visi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditetapkan sebagai berikut:

” Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan “

Misi merupakan tindakan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visinya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh perangkat daerah dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Sedangkan Misi yang diemban untuk mencapai Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih diatas selanjutnya dijabarkan dalam 17 Program Dedikasi yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah:

17 PROGRAM DEDIKASI

Misi#	Program
Misi#1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia;
	Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa
	Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok
	Pasantren Idaman Terbaik
	Program Etam Sejahtera
Misi#2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera
	Program Petani/Peternak/Nelayan Tangguh
	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.
	Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah.
	Program Stimulus Komunitas Kreatif
Misi#3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.	Program Pelayanan Publik Cerdas
	Program ASN Kukar Terbaik
Misi#4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.	Program RT Ku-Terbaik
	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku.
	Program Jaga Lingkungan Lestari
Misi#5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik.
	Program Internet Desa Gratis.
	Program Permukiman Idaman Terbaik.

Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 3. Program Dedikasi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan tugas dan fungsi, maka kecamatan mendukung secara langsung ke program dedikasi: a). Program Pelayanan Publik Cerdas dan b). Program RT-ku Terbaik. Selain itu, kecamatan juga mendukung secara tidak langsung terhadap program-program dedikasi lainnya. Adapun penjelasan kedua program dedikasi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Publik Cerdas

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan publik, dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi sebagai pendorong dalam pelaksanaan prinsip-prinsip smart and good governance hingga tercipta tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan kegiatan prioritas adalah pembangunan mini mall pelayanan publik cerdas pada setiap kecamatan yang diintegrasikan dengan konsep kecamatan sebagai Pusat Data dan Layanan Informasi.

b. Program RT Ku-Terbaik

Merupakan dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang ditujukan untuk mendorong dan mengoptimalkan peran lembaga RT sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan warga, dengan memperkuat Program 50 Juta per RT, menjadi minimal 150 Juta Per-RT dan dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, program ini diarahkan pada penguatan hubungan sosial kemasyarakatan, keamanan, keagamaan, bina lingkungan, prasarana dan sarana umum pada skala RT, serta memperkuat penyediaan data administrasi kependudukan yang lebih aktual dan valid yang dikemas dalam program-program swakelola tematik sesuai dengan hasil musyawarah RT yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam hal mengawal proses pelaksanaan program, maka diperkuat dengan peningkatan kapasitas Pendekar Idaman, dengan pola kerja yang terstruktur, responsif, cakap dalam mengelola dinamika pembangunan desa/kelurahan secara bertanggung jawab. Khusus untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, maka diperkuat dengan optimalisasi aparat keamanan di tingkat satuan wilayah terkecil (desa/kelurahan) yakni Penyediaan bantuan operasional Babinsa dan Babinkamtibmas, serta untuk memperkuat aktivitas pemberdayaan masyarakat di wilayah desa/kelurahan, maka alokasi RT dapat menunjang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan memberikan bantuan operasional/insentif, selanjutnya pola distribusi alokasi program per RT

diperkuat pula dengan pengalokasian anggaran per tahun secara proporsional berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK), dengan alokasi minimal sebesar Rp. 1 Juta per KK.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup di wilayah Kecamatan adalah Proses evaluasi dan analisis terhadap rencana tata ruang wilayah kecamatan, yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan berkelanjutan.

Ini mencakup penilaian kesesuaian rencana dengan kondisi lingkungan, potensi dampak, serta upaya mitigasi dan pelestarian lingkungan.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu:

- Kegiatan Pasca Tambang Belum Dilakukan dengan Baik
Kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama tambang batubara, meninggalkan banyak lahan dengan karakteristik pasca tambang yang merusak. Lubang besar, penurunan muka tanah, dan potensi longsor menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan lingkungan hidup. Proses reklamasi yang seharusnya menjadi kewajiban belum terlaksana optimal, menyebabkan gangguan ekologis jangka panjang serta memperparah kerusakan lahan dan menurunkan nilai produktivitas wilayah.
- Kerusakan Hutan Dan Lahan
Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami tingkat kerusakan hutan dan perubahan lahan yang cukup tinggi. Penebangan liar, perambahan lahan, dan kegiatan pertambangan ilegal menjadi penyebab utama degradasi kawasan hutan yang luasnya mencapai lebih dari 83% dari total wilayah kabupaten. Dari kawasan ini, sekitar 52% merupakan hutan produksi yang semestinya dijaga keberlanjutannya. Namun, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum mengakibatkan ekosistem hutan rentan rusak dan kehilangan fungsi ekologis.
- Perubahan Lingkungan Sekitar Perairan Sungai
Perubahan lingkungan juga terlihat nyata di wilayah perairan, pesisir. Ekosistem mangrove di Delta Mahakam rusak parah, menyebabkan abrasi meningkat hingga 10 kali lipat dari biasanya. Intrusi air laut di DAS Mahakam memperburuk kualitas air minum masyarakat. Menurunnya vegetasi air, kualitas air yang tercemar, serta pendangkalan sungai telah mengganggu sistem hidrologi dan

keanekaragaman hayati. Kondisi ini diperparah oleh pembangunan permukiman dan konversi lahan yang tidak terkendali.

- **Alih Fungsi Lahan**

Alih fungsi lahan menjadi isu krusial yang perlu segera diantisipasi. Banyak lahan pertanian produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralih menjadi kawasan tambang, industri, maupun permukiman tanpa perencanaan yang komprehensif. Hal ini mengancam ketahanan pangan daerah dan menurunkan daya dukung lingkungan. Ketiadaan regulasi spesifik di tingkat kabupaten mengenai pembatasan alih fungsi lahan memperburuk kondisi, dan menyebabkan konflik ruang serta ketidakseimbangan pembangunan wilayah.

3. Potensi Kecamatan Muara Jawa

Kecamatan Muara Jawa memiliki potensi yang sangat beragam dan strategis, diantaranya:

A. Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam:

- Pertanian dan Perkebunan: Potensi besar sebagai lumbung pangan dengan komoditas seperti padi, jagung, nanas, sayuran, lada, mangga, rambutan, kelengkeng, durian, buah naga, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, nipah.
- Perikanan dan Kelautan: Merupakan penghasil ikan air tawar, Sungai, tambak, dan laut (ikan, udang, kepiting).
- Peternakan: Potensi untuk sapi potong, ayam potong, ayam ras, kambing, bebek, entok.
- Pertambangan dan Industri: Keberadaan industri gas, minyak sawit, batu bara, dan pengolahan limbah minyak.
- Sektor Pariwisata: Destinasi alam menarik seperti sumber air panas Dondang dan waterboom Handil 7.

B. Memiliki Posisi Strategis,

Terletak di wilayah timur Kabupaten Kutai Kartanegara dan secara geografis sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Sebagian wilayah Kecamatan Muara Jawa juga telah ditetapkan sebagai bagian dari delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) baru Indonesia, membuka peluang signifikan untuk pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik di masa depan.

4. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang relevan dengan Kecamatan

Beberapa isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu: Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN, Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar, Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor).

5. Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD

Beberapa isu lingkungan dinamis Kabupaten Kutai Kartanegara yang relevan dengan Perangkat Daerah yaitu:

- Aspek Global: Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi, Perkembangan Teknologi yaitu untuk memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan efisien kepada masyarakat. Isu lingkungan dinamis yang muncul antara lain adalah adanya kesenjangan digital (digital divide), masalah keamanan data dan privasi, kebutuhan akan literasi digital Masyarakat.
- Aspek Nasional: Intinya adalah pengembangan potensi sumber daya manusia (SDM) dan modal manusia adalah adanya perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang mengancam ketersediaan sumber daya alam, memicu krisis sosial, dan menuntut adaptasi keterampilan baru yang selaras dengan ekonomi hijau dan digital, yang juga menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup dan dampak besar dari pembangunan IKN (misal: perubahan lahan, peningkatan sampah, tekanan penduduk) dan pengaruh kebijakan nasional terkait energi/lingkungan dan ketidakmerataan akses pendidikan dan keterampilan, keterbatasan SDM pengawas lingkungan, penurunan kualitas lingkungan akibat pembangunan industri, krisis sumber daya alam (air, pangan), serta kesenjangan akses antara perkotaan dan pedesaan yang menghambat peningkatan kualitas SDM.

- Aspek Regional: Intinya adalah Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN untuk Pengembangan Kota Cerdas (Smart City): Mengintegrasikan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara efisien, Ekonomi Sirkular dan Hijau yaitu untuk mendorong model bisnis yang meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya, serta mengembangkan industri hijau, Infrastruktur Berkelanjutan: Membangun infrastruktur yang tahan iklim dan ramah lingkungan untuk mendukung kegiatan ekonomi superhub, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor hijau dan memastikan lingkungan yang sehat untuk penduduk.
- Aspek Wilayah Kutai Kartanegara: Yaitu Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN: pada peningkatan infrastruktur (jalan, akses), pengembangan potensi investasi (hilirisasi industri, pariwisata, pertanian), serta percepatan pelayanan publik dan tata ruang untuk menarik investor dan menunjang kebutuhan IKN, Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal: yaitu akses setara terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta sarana air bersih dan sanitasi, Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas: melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengembangan keterampilan digital dan inovasi, penciptaan lingkungan kerja yang positif, peningkatan kesejahteraan, serta sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan.

6. Isu Strategis Perangkat Daerah (Kecamatan Muara Jawa)

- Dampak dan Peluang IKN: Meskipun masuk delineasi IKN, pembangunan infrastruktur fisik dari pemerintah pusat belum signifikan, sementara pengembangan SDM sudah mulai dilakukan. Ada ketidakjelasan peralihan tanggung jawab pembangunan dari Pemkab ke Pemerintah Pusat, sehingga pembiayaan dan pembangunan masih ditangani Pemkab Kukar. Hal ini menimbulkan tantangan koordinasi dan pemanfaatan peluang IKN secara optimal.

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*excellent service*) yang cepat, mudah, murah, efisien, dan transparan, serta berbasis elektronik.
- Peningkatan Infrastruktur: Prioritas perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan yang masih sangat minim di beberapa wilayah.
- Kemiskinan dan Stunting: Tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting menjadi isu strategis yang membutuhkan program penanggulangan terkoordinasi dan efektif.
- Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Kebutuhan untuk mengelola potensi daerah secara berkelanjutan, mengatasi permasalahan lingkungan akibat eksploitasi (terutama batubara), dan memastikan kelestarian ekosistem.
- Tata Kelola Pemerintahan: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis elektronik dan peningkatan kompetensi aparatur.

Berdasarkan pemaparan gambaran umum pelayanan, identifikasi permasalahan, serta analisis mendalam terhadap berbagai isu strategis—termasuk dimensi KLHS dan isu lingkungan dinamis pada skala global, nasional, dan regional—dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Muara Jawa memiliki potensi besar namun juga menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius. Pemahaman menyeluruh terhadap kondisi eksisting dan proyeksi isu ke depan ini menjadi landasan krusial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Muara Jawa. Langkah selanjutnya adalah menetapkan visi dan misi yang jelas, serta merancang program kerja yang adaptif dan solutif untuk mencapai pembangunan Kecamatan Muara Jawa yang lebih maju dan berkelanjutan dalam periode 2025-2029. Adapun teknik penyimpulan Isu Strategis terdapat pada tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2. 12. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUTAI KARTANEGARA	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemerintah Daerah mendorong program hilirisasi komoditas unggulan dengan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dekat sumber bahan baku	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Ketahanan Pangan sebagai Daerah Mitra IKN	Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi	Rendahnya Produktivitas	Peluang Pembangunan Superhub Ekonomi dan Mitra IKN	Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN	Dampak dan Peluang IKN

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUTAI KARTANEGARA	
Memiliki posisi yang strategis (dekat dengan IKN)	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat			Pemerataan Pembangunan Wilayah	Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam, antara lain Pertanian dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan,	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar,	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar		Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas	Peningkatan Layanan Infrastruktur

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUTAI KARTANEGARA	
Peternakan, Kehutanan, Pariwisata, serta Pertambangan dan Industri	konektivitas, trantibum, lingkunagn hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)						

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUTAI KARTANEGARA	
Tingginya partisipasi masyarakat yang berkolaborasi & terlibat Komunitas dalam Pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat			Kemiskinan dan Stunting
Desa Mandiri sebagai Pilar Ketahanan Sosial yang cukup kuat di Kabupaten Kutai Kartanegara	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUTAI KARTANEGARA	
Ekosistem Pesisir sebagai “Karbon Biru” & Keanekaragaman Hayati Penguatan Regulasi Lingkungan Terbaru		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan					Tata Kelola Pemerintahan
		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor)					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	KUTAI KARTANEGARA	
			Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		

Penjelasan masing-masing isu strategis Kecamatan Muara Jawa dalam kurun waktu 2025 –2029, adalah sebagai berikut:

1. Integrasi dengan Pembangunan IKN Nusantara.

Dekatnya Kecamatan Muara Jawa dengan IKN Nusantara membuka peluang besar untuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi lokal. Sebagai bagian dari wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan baru, Kecamatan Muara Jawa diproyeksikan akan mengalami perkembangan pesat, baik dari segi infrastruktur maupun migrasi penduduk. Namun, peluang ini juga membawa tantangan besar, terutama terkait tekanan terhadap lahan produktif, potensi konflik tata ruang, dan dampak sosial-ekonomi dari proses urbanisasi yang cepat.

Pemerintah Kecamatan Muara Jawa harus segera menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan kebijakan pembangunan IKN Nusantara untuk menghindari konflik penggunaan lahan dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang. Kolaborasi dengan instansi terkait, termasuk pihak pemerintah pusat dan IKN, akan menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan harmonis. Selain itu, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari IKN dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak sosial-ekonomi dari migrasi penduduk yang dipicu oleh pembangunan IKN, seperti peningkatan kebutuhan akan perumahan, fasilitas umum, dan lapangan pekerjaan.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sistem pelayanan publik di Kecamatan Muara Jawa masih banyak yang dilakukan secara manual, yang menghambat efisiensi dan transparansi. Dalam era digitalisasi ini, penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Pemerintah kecamatan harus segera melakukan digitalisasi administrasi dan pelayanan publik dengan mengadakan perangkat keras dan lunak yang memadai. Selain itu, pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam bidang teknologi informasi dan pengembangan aplikasi pelayanan publik sangat diperlukan. Aplikasi pelayanan publik ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, perizinan, pengelolaan data penduduk, serta mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan, program, dan layanan pemerintah.

3. Peningkatan Layanan Infrastruktur

Meskipun Kecamatan Muara Jawa memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, infrastruktur dasar di wilayah ini masih terbatas. Beberapa jalan penghubung antar desa dalam kondisi rusak, fasilitas pelayanan publik kurang memadai, dan akses internet yang terbatas menjadi masalah utama. Kondisi ini menghambat perkembangan ekonomi, akses pendidikan, serta kualitas pelayanan publik.

Untuk mengatasi masalah ini dalam lima tahun mendatang, pemerintah kecamatan perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi perbaikan jalan antar desa, peningkatan fasilitas kantor kecamatan dan kelurahan, serta perluasan jaringan internet untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah juga perlu melakukan perencanaan yang matang dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta sektor swasta untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan Kecamatan Muara Jawa dapat menjadi kawasan yang lebih terhubung, efisien, dan siap menyambut tantangan pembangunan di masa depan.

4. Kemiskinan dan Stunting

Kemiskinan dan Stunting saling keterkaitan antara kondisi ekonomi keluarga yang buruk dengan kejadian stunting pada anak, yang memerlukan solusi komprehensif melalui peningkatan kualitas SDM, program ketahanan pangan, serta perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial untuk menciptakan generasi penerus yang sehat dan produktif. Kondisi ekonomi keluarga yang rendah dapat menghambat kemampuan orang tua untuk menyediakan makanan bergizi seimbang bagi anak, termasuk pada ibu hamil masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yang dapat menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif, yang pada akhirnya menyebabkan stunting.

Dengan adanya pengembangan potensi kewilayahan, diharapkan Kecamatan Muara Jawa bisa memanfaatkan peluang besar ini. Dapat mengurangi kemiskinan dengan menyediakan banyak lapangan pekerjaan melalui UMKM yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dengan semakin berkembangnya perekonomian masyarakat sedikit demi sedikit masalah kemiskinan bisa berkurang, seiring dengan berkurangnya kemiskinan maka masalah stunting pun bisa teratasi.

Selain mengembangkan perekonomian masyarakat, pihak kecamatan pun perlu bekerjasama dengan semua pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan keluarga, dalam gerakan

percepatan penurunan stunting dan mencegah stunting. Dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan melalui posyandu, karena mengatasi kemiskinan dan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif, kegiatan yang bisa dilakukan seperti diversifikasi pangan yaitu mendorong pangan lokal yang beragam dan bergizi untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis makanan seperti beras, peningkatan akses layanan dasar dan meningkatkan peran perempuan serta pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesadaran gizi, sanitasi dan kebersihan.

5. Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Kecamatan Muara Jawa memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan, perkebunan, dan perikanan. Sektor ekonomi lokal di Kecamatan Muara Jawa, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, menghadapi berbagai tantangan, antara lain terbatasnya akses ke modal, teknologi, dan pasar. Hal ini menghambat potensi sektor-sektor tersebut untuk berkembang lebih pesat.

Pemerintah kecamatan perlu mendorong investasi di sektor hilir, seperti pengolahan hasil pertanian dan perikanan, untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. Program-program pelatihan berbasis kebutuhan lokal juga harus diadakan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, memperkuat koperasi sebagai wadah untuk pelaku UMKM dalam mengakses modal dan pasar perlu menjadi prioritas. Peningkatan akses ke pasar regional dan nasional juga harus dilakukan melalui penguatan infrastruktur transportasi dan promosi produk lokal, sehingga masyarakat Muara Jawa dapat lebih mudah memasarkan hasil pertanian dan perikananannya.

Namun, eksploitasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ancaman serius bagi kelestarian alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, terutama pada kawasan pesisir dan sungai. Kontaminasi air akibat limbah domestik dan industri merupakan salah satu masalah besar yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar.

Untuk menghadapi masalah ini dalam lima tahun ke depan, pemerintah kecamatan akan melakukan rehabilitasi lahan kritis khususnya pada lahan bekas tambang. Hal ini diupayakan dengan berkoodinasi dengan perangkat daerah teknis dan pihak lain termasuk peran masyarakat dan swasta. Program edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pelestarian lingkungan juga akan ditingkatkan, baik

kepada masyarakat umum maupun pelaku industri dan usaha. Selain itu, kecamatan dapat memanfaatkan peluang kerjasama dengan IKN Nusantara untuk implementasi teknologi ramah lingkungan.

6. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam menghadapi tantangan pengembangan kewilayahan tentunya tata kelola pemerintahan perlu untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, serta koordinasi yang efektif untuk mengatasi isu seperti ketenteraman masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan kualitas pembangunan lingkungan, sangat di perlukan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

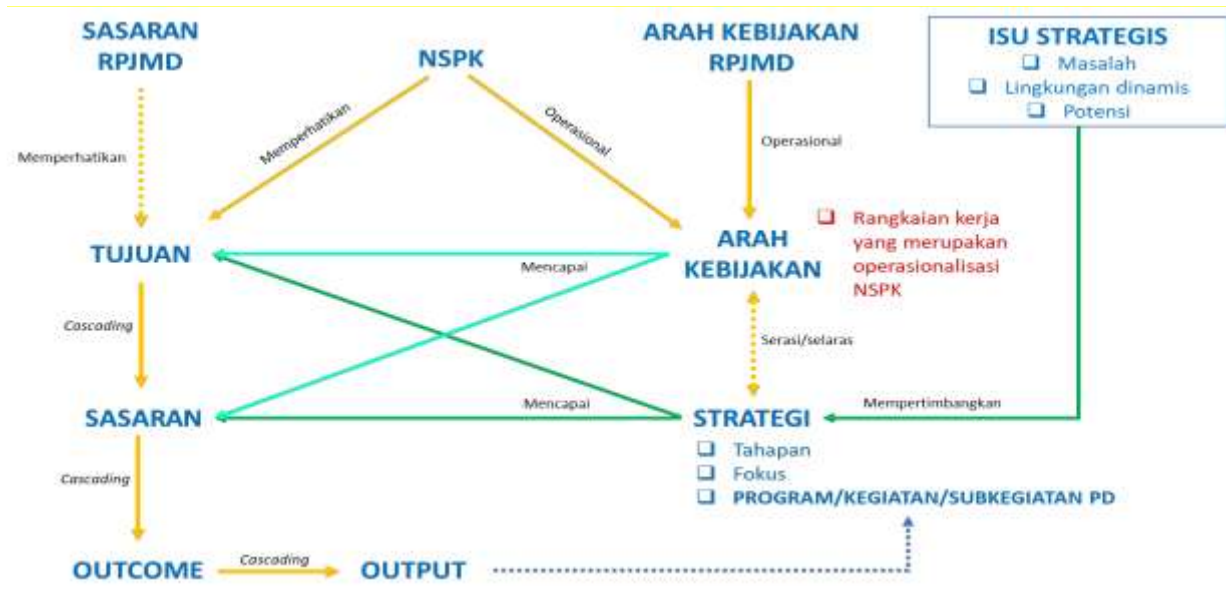
Pemerintahan Kecamatan Muara Jawa pada saat ini masih mengalami kendala dalam hal pelayanan publik, karena jumlah Sumber Daya Manusia dan kompetensi yang ada belum terpenuhi, sehingga perlu penyediaan sumber daya manusia yang smart dan profesional, dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur kecamatan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pelatihan. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan sarana prasarana pendukung demi lancarnya pelayanan yang diberikan agar tercapainya pemerintahan akuntabel dan berorientasi.

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti kompleksitas di mana implementasi tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan banyak aspek dan memerlukan intervensi yang kompleks, selanjutnya perlu adanya komitmen dan sinergi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama serta Setiap daerah memiliki permasalahan pemerintahan yang berbeda, sehingga implementasi tata kelola harus disesuaikan dengan konteks lokal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Jawa dilakukan dengan konsep seperti gambar berikut:



Gambar 4. Konsep Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Hubungan antara tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Tujuan dan sasaran dicapai dengan beberapa strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

3.1.1. Tujuan Renstra Kecamatan Muara Jawa

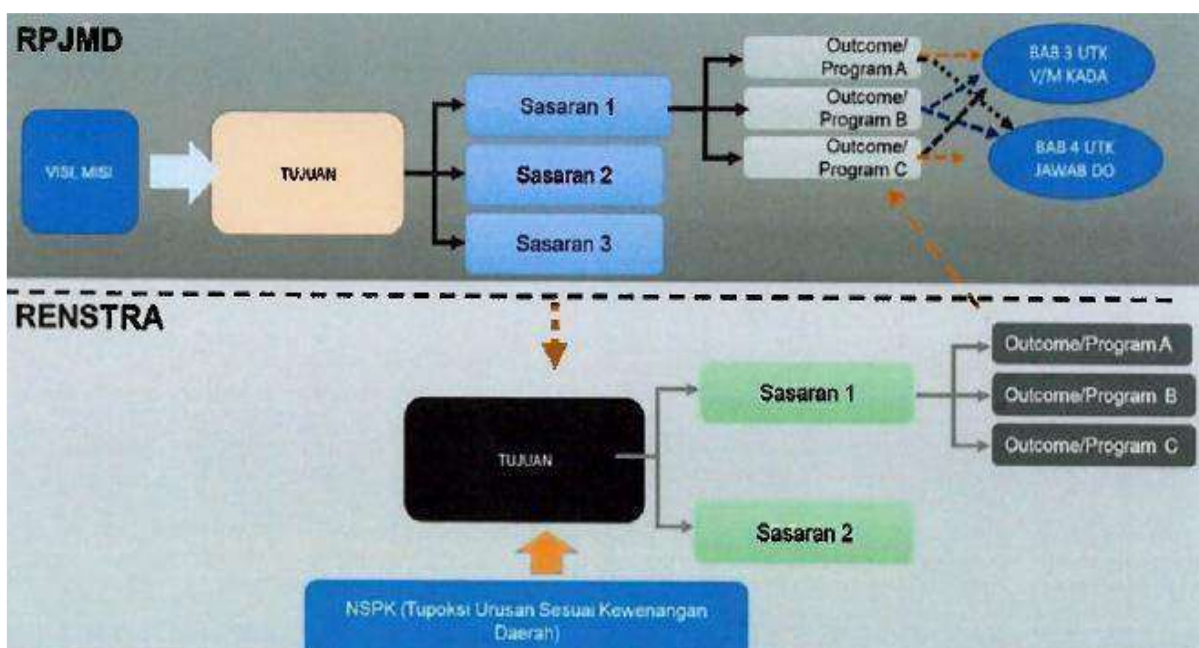
Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan saasaran RPJMD. Kecamatan Muara Jawa menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu "Meningkatnya kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan". Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Jawa yaitu memberikan pelayanan yang prima di wilayah kecamatan bagi seluruh masyarakat.

Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu *”Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.”* Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan Renstra Kecamatan Muara Jawa mendukung sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang berada pada tujuan 2 RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing.

3.1.2. Sasaran Renstra Kecamatan Muara Jawa

Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun sasaran strategis Kecamatan Muara Jawa adalah *”Meningkatnya kualitas layanan administrasi di Kecamatan”*.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 5. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dapat terlihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3. 1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan		Indeks pelayanan publik kecamatan	n.a	3,65	3,73	3,81	3,89	3,97	4,05	Definisi Operasional: Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kecamatan berdasarkan : - Aspek Kebijakan Pelayanan - Aspek Profesionalisme SDM - Aspek Sarana Prasarana - Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan											- Aspek Konsultasi dan Pengaduan - Aspek Inovasi Cara hitung : Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik											

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 penyelenggaraa n Pelayanan Adminsitasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	100,00	100	100	100	100	100	100	Definisi operasional : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah perbandingan antara sistem pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai SOP dengan jumlah layanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan . Cara Hitung : Jumlah Pelayanan yang se suai SOP dibagi total jumlah Pelayanan dikali 100

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
saran RPJMD: Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan	n.a	74,38	75,63	76,88	81,25	84,38	87,5	Definisi operasional : Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja pelayanan pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan. Cara hitung: dengan menghitung jumlah capaian bobot dari 6 indikator, yaitu: 1. Penilaian Bobot Kualitas Pelayanan Kepuasan masyarakat terhadap layanan

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											administrasi (KTP, KK, dll.) 35% 2. Pengelolaan Keuangan : Laporan keuangan tepat waktu dan transparansi anggaran 15% 3. Partisipasi Masyarakat Jumlah partisipasi masyarakat dalam musyawarah kelurahan 15% 4. Inovasi Pembangunan Program pengentasan kemiskinan atau pengelolaan sampah 10% 5. Kualitas Aparatur Pelatihan dan

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
											peningkatan kompetensi aparatur kelurahan 10% 6. Pengelolaan Lingkungan Keberhasilan dalam program penghijauan atau kebersihan 15%

Sumber: Data Kecamatan Muara Jawa

3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang konferhensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Jawa yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Tabel 3. 2. Strategi Renstra Kecamatan Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi di kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, regional, dan kabupaten, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Muara Jawa sangat penting untuk menunjukkan di mana sub kegiatan akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Secara geografis, beberapa kecamatan di Kutai Kartanegara seperti Kecamatan Muara Jawa telah diposisikan sebagai daerah mitra utama IKN. Wilayah ini memiliki keunggulan strategis karena kedekatannya dengan kawasan inti IKN sekaligus akses langsung ke jalur konektivitas menuju Balikpapan dan Samarinda.

Arah kebijakan pembangunan di kawasan ini menitikberatkan pada pembentukan pusat layanan publik, pengembangan kawasan permukiman terintegrasi, serta peningkatan peran sebagai hub logistik dan transportasi. Selain itu, Kecamatan Muara Jawa diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi hijau, pariwisata, dan hilirisasi pertanian, sehingga mampu berperan ganda: mendukung kebutuhan langsung IKN sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Dengan demikian, peran Kutai Kartanegara sebagai daerah transisi IKN tidak hanya sebatas penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai mitra pembangunan strategis yang memastikan keberlanjutan ekosistem ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penetapan Kecamatan Muara Jawa sebagai bagian dari kawasan mitra IKN menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan pembangunan daerah dengan agenda nasional, sehingga Kutai Kartanegara dapat mengambil manfaat maksimal dari keberadaan IKN, baik dalam bentuk peningkatan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, maupun diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal.

Daerah Transisi IKN ditetapkan sebagai zona transisi Ibu Kota Negara (IKN) dengan fungsi sebagai penyangga strategis.

- Peningkatan infrastruktur dasar dan transportasi.
- Penataan ruang permukiman yang adaptif terhadap kebutuhan IKN.
- Pengembangan kawasan strategis sebagai daerah penopang pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam pelaksanaan strategi pembangunan di kecamatan, perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Jawa. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
2026	2027	2028	2029	2030
Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan di Wilayah Kecamatan	Perwujudan fondasi transformasi di Wilayah Kecamatan dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan
Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah serta penguatan kelembagaan pelaku usaha berbasis masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing lokal.	Penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi dan pemanfaatan potensi lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Perwujudan transformasi produk unggulan berbasis ekonomi hijau sebagai upaya peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan daerah	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan
Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Pengembangan aksesibilitas wilayah dan fasilitas publik berwawasan lingkungan untuk	Pengembangan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung	Perwujudan sistem infrastruktur aksesibilitas dan mobilitas yang modern, dan terhubung	Penerapan Integrasi jaringan infrastruktur antarwilayah yang menunjang konektivitas

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
	mendukung pemerataan pembangunan.	pertumbuhan ekonomi daerah		ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah
Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan
Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat	Penerapan Integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana ke dalam seluruh sektor pembangunan	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Penguatan energi terbarukan dan akselerasi pengurangan emisi karbon untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis, 2025

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Kecamatan Muara Jawa sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pelayan-an Yang Prima	Digitalisasi layanan publik	Implementasi Standar Pelayanan Dan Digitalisasi Pelayanan Di Tingkat Kecamatan	Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Perizinan	Penguatan sistem pengaduan	Meningkatkan Koodinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3	Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Desa dan Kelurahan	Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
4	Peningkatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Desa/Kelurahan
5			Meningkatkan Pemberdayaan Kelurahan	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Kelurahan
6			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
7			Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
8			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

Sumber: Hasil analisis, 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

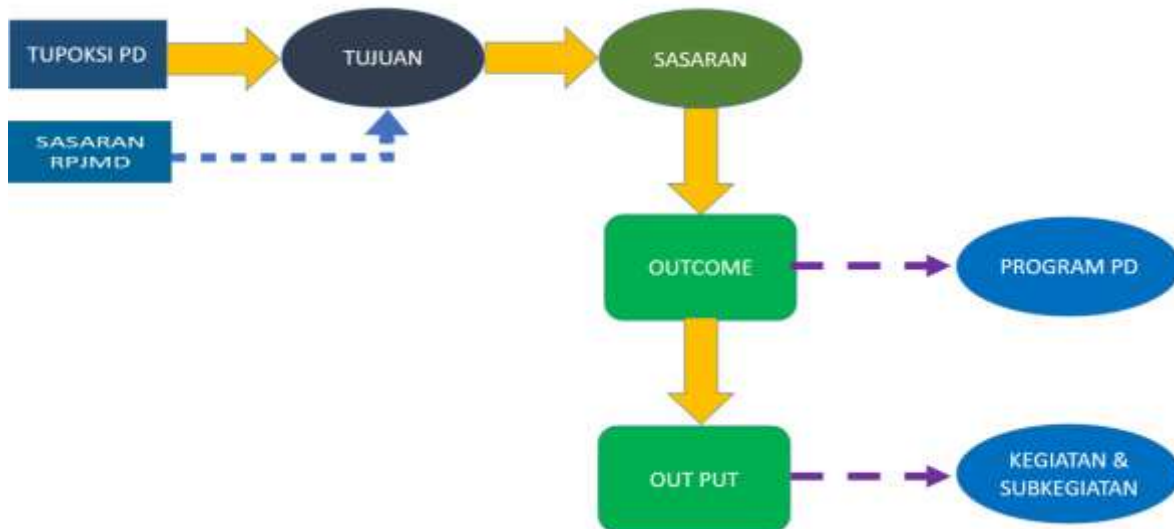
4.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Muara Jawa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Muara Jawa.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan Tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Muara Jawa.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Kecamatan Muara Jawa selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa periode 2025-2029. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Muara Jawa merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Muara Jawa dijelaskan pada gambar 6 di bawah ini:



Gambar 6. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan program dan kegiatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2024 Nomor 900.1.15.5-3406 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Unsur urusan kewilayahan.

Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan				Indeks pelayanan publik kecamatan		
		Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan			Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3.Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil; 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).					Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan		
Sasaran RPJMD: Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselesainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terselesaikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan	Bimbingan Teknis Implementasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	Pengadaan Kendaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Reha	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan		Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan		
				Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif		
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksanannya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksanannya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Terlaksanannya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Evaluasi Kelurahan	
				Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	
			Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Regional, dan Nasional		Regional, dan Nasional	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

Sumber: Data Kecamatan Muara Jawa

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan dibawah ini:

Tabel 4. 2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Kecamatan Muara Jawa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01 - KECAMATAN					54.412.725.138,0 0		59.205.963.131,7 2		60.676.525.525,3 4		63.855.280.282,0 9		66.377.715.264,4 5			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.722.075.138,0 0		22.809.248.414,0 0		22.859.248.414,0 0		22.964.806.414,0 0		23.159.806.414,0 0			
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Jawa)	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	49,32	57,51	61	20.722.075.138,0 0	62	22.809.248.414,0 0	63	22.859.248.414,0 0	64	22.964.806.414,0 0	65	23.159.806.414,0 0	7.01.1.03.0.00.07.000 0 - Kecamatan Muara Jawa		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					340.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		290.000.000,00		335.000.000,00			
Terselesainya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	1	340.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00	1	290.000.000,00	2	335.000.000,00			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0		1		1		1		1				
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16	3	2		2		2		3		2				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	0		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	0		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	18	0	4		4		4		4		4				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	16	3	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	3	40.000.000,00	2	60.000.000,00			
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		Muara Jawa	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	0	0,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00			
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		Muara Jawa	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	0	0,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00			
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		Muara Jawa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	18	0	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00			
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		35.000.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2	35.000.000,00			
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	2	2	250.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00			
7.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.217.892.420,00		16.242.892.420,00		16.242.892.420,00		16.242.892.420,00		16.242.892.420,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terselesaikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	16.217.892.420,00	1	16.242.892.420,00	1	16.242.892.420,00	1	16.242.892.420,00	1	16.242.892.420,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.032	1.503	2.100		2.100		2.100				2.100				
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	12			12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					15.731.492.420,00		15.731.492.420,00		15.731.492.420,00		15.731.492.420,00		15.731.492.420,00		Muara Jawa	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.032	1.503	2.100	15.731.492.420,00	2.100	15.731.492.420,00	2.100	15.731.492.420,00		15.731.492.420,00	2.100	15.731.492.420,00			
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Muara Jawa	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					461.400.000,00		461.400.000,00		461.400.000,00		461.400.000,00		461.400.000,00		Muara Jawa	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	12		461.400.000,00	12	461.400.000,00	12	461.400.000,00	12	461.400.000,00	12	461.400.000,00			
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					5.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		Muara Jawa	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	1	5.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00			
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					130.200.000,00		280.200.000,00		280.200.000,00		280.200.000,00		280.200.000,00			
Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	130.200.000,00	1	280.200.000,00	1	280.200.000,00	1	280.200.000,00	1	280.200.000,00			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	0		1		1		1		1				
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Muara Jawa	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
7.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
7.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Muara Jawa	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
7.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					55.200.000,00		55.200.000,00		55.200.000,00		55.200.000,00		55.200.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	2	55.200.000,00	2	55.200.000,00	2	55.200.000,00	2	55.200.000,00	2	55.200.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					50.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00			
Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	50.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	0	5		20		20		20		20				
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		Muara Jawa	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					50.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10	0	5	50.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					731.676.000,00		1.238.000.000,00		1.238.000.000,00		1.238.000.000,00		1.238.000.000,00			
Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	7	6	731.676.000,00	9	1.238.000.000,00	9	1.238.000.000,00	9	1.238.000.000,00	9	1.238.000.000,00			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1						
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	718	627	375		670		670		670		670				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	27	27		27		27				27				
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	0		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	8	9		9		9		9		9				
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					60.150.000,00			47.000.000,00				47.000.000,00				Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g , Muara Jawa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	7	6	60.150.000,00	9	47.000.000,00	9	47.000.000,00	9	47.000.000,00	9	47.000.000,00			
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g , Muara Jawa	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Muara Jawa	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					207.593.500,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		410.000.000,00		Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9	27	27	207.593.500,00	27	410.000.000,00	27	410.000.000,00		410.000.000,00	27	410.000.000,00				
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					37.043.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00				Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g . Muara Jawa
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	8	9	37.043.000,00	9	51.000.000,00	9	51.000.000,00	9	51.000.000,00	9	51.000.000,00				
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material					0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00				Muara Jawa
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00				
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00				Muara Jawa
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	0	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					301.940.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00		Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g , Muara Jawa	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	718	627	375	301.940.000,00	670	525.000.000,00	670	525.000.000,00	670	525.000.000,00	670	525.000.000,00			
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					39.949.500,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	39.949.500,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.000.000,00		920.282.000,00		970.282.000,00		1.030.840.000,00		1.180.840.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	150.000.000,00	0	920.282.000,00		970.282.000,00	1	1.030.840.000,00	1	1.180.840.000,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	24	0		19		19		20		20				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	1		1		1		0		0				
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	2	1		8		9		8		9				
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	0						1		1				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0		1										
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		0,00		0,00		500.000.000,00		500.000.000,00		Muara Jawa	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	0	0,00		0,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00			
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					100.000.000,00		514.442.000,00		514.442.000,00		0,00		0,00		Muara Jawa	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	1	100.000.000,00	1	514.442.000,00	1	514.442.000,00	0	0,00	0	0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					50.000.000,00		95.840.000,00		245.840.000,00		95.840.000,00		245.840.000,00		Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g , Muara Jawa	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	2	1	50.000.000,00	8	95.840.000,00	9	245.840.000,00	8	95.840.000,00	9	245.840.000,00			
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00		210.000.000,00		210.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Jawa	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	24	0	0,00	19	210.000.000,00	19	210.000.000,00	20	235.000.000,00	20	235.000.000,00			
7.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		Muara Jawa	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	0	0,00		0,00		0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		Muara Jawa	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	1	100.000.000,00		0,00		0,00		0,00			
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.381.856.718,00		2.602.873.994,00		2.602.873.994,00		2.602.873.994,00		2.602.873.994,00			
Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	2.381.856.718,00	12	2.602.873.994,00	12	2.602.873.994,00	12	2.602.873.994,00	12	2.602.873.994,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6.500.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	6.500.000,00	12	62.000.000,00	12	62.000.000,00	12	62.000.000,00	12	62.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.462.920.394,00		1.462.920.394,00		1.462.920.394,00		1.462.920.394,00		1.462.920.394,00		Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g , Muara Jawa	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	1.462.920.394,00	12	1.462.920.394,00	12	1.462.920.394,00	12	1.462.920.394,00	12	1.462.920.394,00			
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					912.436.324,00		1.077.953.600,00		1.077.953.600,00		1.077.953.600,00		1.077.953.600,00		Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g , Muara Jawa	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	912.436.324,00	12	1.077.953.600,00	12	1.077.953.600,00	12	1.077.953.600,00	12	1.077.953.600,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					720.450.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		780.000.000,00		780.000.000,00			
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35	20	33	720.450.000,00	33	750.000.000,00	33	750.000.000,00	33	780.000.000,00	33	780.000.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0		0		1		1		1				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	280	160	118		145		145		145		145				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	0	2		2		2		2		2				
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	280	50	0		0		0		0		0				
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Muara Jawa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					301.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g , Muara Jawa	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	35	20	33	301.000.000,00	33	325.000.000,00	33	325.000.000,00	33	325.000.000,00	33	325.000.000,00			
7.01.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Muara Jawa	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					119.450.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g , Muara Jawa	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	280	160	118	119.450.000,00	145	125.000.000,00	145	125.000.000,00	145	125.000.000,00	145	125.000.000,00			
7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	280	50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					200.000.000,00		200.000.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	0	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	170.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00			
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		Muara Jawa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					12.649.650.000,00		3.421.714.717,72		4.817.277.111,34		7.890.473.868,09		10.217.908.850,45			
Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Muara Jawa)	Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan (Nilai)	0	3	3	12.199.650.000,00	3	2.631.714.717,72	3	4.027.277.111,34	3	7.100.473.868,09	3	9.427.908.850,45	7.01.1.03.0.00.07.0000 - Kecamatan Muara Jawa		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					12.199.650.000,00		2.631.714.717,72		4.027.277.111,34		7.100.473.868,09		9.427.908.850,45			
Terlaksananya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4	5	4	12.199.650.000,00	3	2.631.714.717,72	3	4.027.277.111,34	3	7.100.473.868,09	3	9.427.908.850,45			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	220	226	60		5		6		28		41				
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					1.469.650.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	4	5	4	1.469.650.000,00	3	1.600.000.000,00	3	1.600.000.000,00	3	1.600.000.000,00	3	1.600.000.000,00			
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					10.730.000.000,00		1.031.714.717,72		2.427.277.111,34		5.500.473.868,09		7.827.908.850,45		Muara Jawa	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	220	226	60	10.730.000.000,00	5	1.031.714.717,72	6	2.427.277.111,34	28	5.500.473.868,09	41	7.827.908.850,45			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Muara Jawa)	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP (%)	100	100	100	450.000.000,00	100	790.000.000,00	100	790.000.000,00	100	790.000.000,00	100	790.000.000,00			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					450.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00		670.000.000,00			
Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1	1	450.000.000,00	9	670.000.000,00	9	670.000.000,00	9	670.000.000,00	9	670.000.000,00			
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	3		3		3		3		3				
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					225.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	3	225.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00			
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					225.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		Muara Jawa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	1	1	225.000.000,00	9	370.000.000,00	9	370.000.000,00	9	370.000.000,00	9	370.000.000,00			
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					0,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00			
Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0	0,00	2	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00			
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					0,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		Muara Jawa	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0	0,00	2	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00			
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					20.581.000.000,00		31.129.000.000,00		31.154.000.000,00		31.154.000.000,00		31.154.000.000,00			
Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Muara Jawa)	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif (%)	100	100	100	20.581.000.000,00	100	31.129.000.000,00	100	31.154.000.000,00	100	31.154.000.000,00	100	31.154.000.000,00	7.01.1.03.0.00.07.0000 - Kecamatan Muara Jawa		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					0,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0	0,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00			
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					0,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g , Muara Jawa	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0	0,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00	2	95.000.000,00			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					6.154.000.000,00		5.988.000.000,00		5.988.000.000,00		5.988.000.000,00		5.988.000.000,00			
Terselenggaranya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	158	92	117	6.154.000.000,00	24	5.988.000.000,00	24	5.988.000.000,00	24	5.988.000.000,00	24	5.988.000.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	55	42	24		24		24		24		24				
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	2	2		0		0		0		0				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Masyarakat)	423	133	342		423		423		423		423					
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					84.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00			Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g , Muara Jawa	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Masyarakat)	423	133	342	84.000.000,00	423	108.000.000,00	423	108.000.000,00	423	108.000.000,00	423	108.000.000,00				
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					3.600.000.000,00		4.280.000.000,00		4.280.000.000,00		4.280.000.000,00		4.280.000.000,00			Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g .	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	55	42	24	3.600.000.000,00	24	4.280.000.000,00	24	4.280.000.000,00	24	4.280.000.000,00	24	4.280.000.000,00				
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					2.400.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00				Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g . Muara Jawa
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	158	92	117	2.400.000.000,00	24	1.600.000.000,00	24	1.600.000.000,00	24	1.600.000.000,00	24	1.600.000.000,00				
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan					70.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00				Muara Jawa
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	2	2	70.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					14.427.000.000,00		25.046.000.000,00		25.071.000.000,00		25.071.000.000,00		25.071.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan (Lembaga Masyarakat)	657	669	668	14.427.000.000,00	515	25.046.000.000,00	515	25.071.000.000,00	515	25.071.000.000,00	515	25.071.000.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat yang Disediakan (Unit)	0		0		1		1		1		1				
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Masyarakat)	16	2	2												
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat					14.327.000.000,00		25.041.000.000,00		25.066.000.000,00		25.066.000.000,00		25.066.000.000,00		Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g , Muara Jawa	
Terselenggaranya Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan (Lembaga Masyarakat)	657	669	668	14.327.000.000,00	515	25.041.000.000,00	515	25.066.000.000,00	515	25.066.000.000,00	515	25.066.000.000,00			
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat					100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Muara Jawa	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Masyarakat)	16	2	2	100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan					0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		Muara Jawa	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0		0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					125.000.000,00		1.016.000.000,00		1.016.000.000,00		1.016.000.000,00		1.016.000.000,00			
Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat (Muara Jawa)	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani (%)	100	100	100	125.000.000,00	100	1.016.000.000,00	100	1.016.000.000,00	100	1.016.000.000,00	100	1.016.000.000,00	7.01.1.03.0.00.07.0000 - Kecamatan Muara Jawa		
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					125.000.000,00		1.016.000.000,00		1.016.000.000,00		1.016.000.000,00		1.016.000.000,00			
Terlaksananya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0	125.000.000,00	3	1.016.000.000,00	3	1.016.000.000,00	3	1.016.000.000,00	3	1.016.000.000,00			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	4	2		2				2		2				
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					0,00		866.000.000,00		866.000.000,00		866.000.000,00		866.000.000,00		Muara Jawa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0	0,00	3	866.000.000,00	3	866.000.000,00	3	866.000.000,00	3	866.000.000,00			
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					125.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	4	2	125.000.000,00	2	150.000.000,00		150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00			
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					335.000.000,00		830.000.000,00		830.000.000,00		830.000.000,00		830.000.000,00			
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Muara Jawa)	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	335.000.000,00	100	830.000.000,00	100	830.000.000,00	100	830.000.000,00	100	830.000.000,00	7.01.1.03.0.00.07.000 - Kecamatan Muara Jawa		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					335.000.000,00		830.000.000,00		830.000.000,00		830.000.000,00		830.000.000,00			
Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	0	2	335.000.000,00	1	830.000.000,00	1	830.000.000,00	1	830.000.000,00	1	830.000.000,00			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1.150	760	810		860		860		860		860				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					260.000.000,00		805.000.000,00		805.000.000,00		805.000.000,00		805.000.000,00		Muara Jawa , Muara Jawa Ilir , Muara Jawa Tengah , Muara Jawa Ulu , Teluk Dalam , Dondang , Tama Pole , Muara Kemban g , Muara Jawa	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	1.150	760	810	260.000.000,00	860	805.000.000,00	860	805.000.000,00	860	805.000.000,00	860	805.000.000,00			
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					75.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Muara Jawa	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	0	2	75.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			

Sumber: Data Kecamatan Muara Jawa dalam sipd-ri.kemendagri.

4.2 Sub Kegiatan Prioritas

Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dari teknik cascading (penurunan kinerja). Dan merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

N O	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Program RT Ku-Terbaik	Penyaluran Program RT di Kecamatan	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	
2	Program Pelayanan Publik Cerdas	Mini Mall Pelayanan Publik di Kecamatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

Sumber : data Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Target keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan, terukur, dan selaras dengan mandat kewenangan serta arah kebijakan pembangunan daerah.

IKU menjadi alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana capaian program dan kegiatan mendukung realisasi tujuan jangka menengah dinas. Penetapan IKU memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektivitas, serta kontribusi langsung terhadap pelayanan publik di Kecamatan. Dengan demikian, keberadaan IKU dalam dokumen Renstra ini diharapkan mampu menjadi dasar pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja secara sistematis dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Jawa sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4. 4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Muara Jawa

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUNAN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDIKATOR TUJUAN									
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	n.a	3,65	3,73	3,81	3,89	3,97	4,05	Definisi Operasional: Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kecamatan berdasarkan : - Aspek Kebijakan Pelayanan - Aspek Profesionalisme SDM - Aspek Sarana Prasarana - Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik - Aspek Konsultasi dan Pengaduan - Aspek Inovasi Cara hitung : Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUNAN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDIKATOR SASARAN									
2	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Definisi operasional : Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah perbandingan antara sistem pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai SOP dengan jumlah layanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan . Cara Hitung : Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi total jumlah Pelayanan dikali 100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUNAN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan	Indeks	n.a	74,38	75,63	76,88	81,25	84,38	87,5	<p>Definisi operasional : Indeks Kualitas Kinerja Kelurahan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja pelayanan pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan.</p> <p>Cara hitung: dengan menghitung jumlah capaian bobot dari 6 indikator, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Bobot Kualitas Pelayanan Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi (KTP, KK, dll.) 35% 2. Pengelolaan Keuangan : Laporan keuangan tepat waktu dan transparansi anggaran 15% 3. Partisipasi Masyarakat Jumlah partisipasi masyarakat dalam musyawarah kelurahan 15% 4. Inovasi Pembangunan Program pengentasan kemiskinan atau pengelolaan sampah 10% 5. Kualitas Aparatur Pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur kelurahan 10% 6. Pengelolaan Lingkungan Keberhasilan dalam program penghijauan atau kebersihan 15%

Sumber : data Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Muara Jawa dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029.

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi :

- (1) Indikator masukan,
- (2) Indikator keluaran,
- (3) Indikator hasil,
- (4) Indikator manfaat,
- (5) Indikator dampak.

Indikator masukan ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Indikator keluaran dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029.

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencanastrategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 dan

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Muara Jawa dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029.

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi :

- (1) Indikator masukan,
- (2) Indikator keluaran,
- (3) Indikator hasil,
- (4) Indikator manfaat,
- (5) Indikator dampak.

Indikator masukan ini dapat berupa dana, sumberdaya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Indikator keluaran dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029.

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 dan

merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kecamatan Muara Jawa..

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Muara Jawa dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Muara Jawa (Renja Kecamatan Muara Jawa) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Renstra Kecamatan Muara Jawa Tahun 2025-2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2025-2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2029;
4. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Akhir-SKPD Kecamatan Muara Jawa tahun 2025-2029 yang tercermin dari Renja SKPD Kecamatan Muara Jawa, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan semangat kemandirian otonomi daerah, dan semangat Visi Kabupaten Kutai Kartanegara maka semestinya Visi tersebut dapat tercapai di masing-masing unit kerja yg diharapkan dapat/mampu memberikan pelayanan yang berarti bagi masyarakat, mampu mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Muara Jawa pada khususnya serta dapat memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya.

Muara Jawa, 5 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Muara Jawa Kutai Kartanegara
MUHAMMAD RAMLI, S.E.,M.M.
Pembina, IV/a

